



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
2015-2019**

**Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong**

**Buku I
Agenda Pembangunan Nasional**

Diperbanyak Oleh :
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
2015



**LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
2015-2019**

**Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong**

**Buku I
Agenda Pembangunan Nasional**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

2014

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis	1-2
1.2 Sistematika	1-3
BAB 2 KONDISI UMUM.....	2-1
2.1 Latar Belakang	2-1
2.2 Permasalahan dan Tantangan	2-4
2.2.1 Tiga Masalah Pokok Bangsa.....	2-4
2.2.2 Tantangan Utama Pembangunan	2-5
BAB 3 LINGKUNGAN STRATEGIS	3-1
3.1 Geo-Ekonomi	3-1
3.2 Geo-politik	3-7
3.2.1 Konstelasi Geo-politik Global	3-7
3.2.2 Lingkungan Geo-politik Regional	3-9
3.2.3 Lingkungan Strategis Nasional	3-11
3.3 Bonus Demografi	3-12
3.4 Agenda Pasca 2015 dan Perubahan Iklim	3-15
BAB 4 KERANGKA EKONOMI MAKRO	4-1
4.1 Kondisi Ekonomi Menjelang Akhir tahun 2014	4-1
4.2 Prospek Ekonomi Tahun 2015-2019	4-9
4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran	4-10
4.2.2 Moneter	4-12
4.2.3 Neraca Pembayaran	4-13
4.2.4 Keuangan Negara dan Fiskal	4-14
4.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan.....	4-15
BAB 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	5-1
5.1 Visi Misi Pembangunan	5-1
5.2 Strategi Pembangunan Nasional	5-2
5.3 Sembilan Agenda Prioritas	5-4
5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional	5-5

BAB 6 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 6-1

- 6.1 Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara6-1
 - 6.1.1 Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif6-2
 - 6.1.2 Penguatan Sistem Pertahanan6-3
 - 6.1.3 Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim.....6-4
 - 6.1.4 Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri.....6-5
 - 6.1.5 Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran.....6-6
 - 6.1.6 Memperkuat Peran dalam Kerjasama Global dan Regional.....6-7
 - 6.1.7 Meminimalisasi Dampak Globalisasi6-12
 - 6.1.8 Pembangunan Industri Pertahanan Nasional6-15
 - 6.1.9 Membangun Polri yang Professional6-16
 - 6.1.10 Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan.....6-17
- 6.2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya6-17
 - 6.2.1 Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik6-18
 - 6.2.2 Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.....6-20
 - 6.2.3 Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan6-21
 - 6.2.4 Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)6-23
 - 6.2.5 Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.....6-24
- 6.3 Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan6-25
 - 6.3.1 Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris.....6-25
 - 6.3.2 Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia.6-37

6.3.3	Penanggulangan Kemiskinan	6-47
6.4	Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	6-50
6.4.1	Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan.....	6-51
6.4.2	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6-55
6.4.3	Pemberantasan Tindakan Penambangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar.....	6-57
6.4.4	Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	6-61
6.4.5	Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah.....	6-61
6.4.6	Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal	6-62
6.5	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia.....	6-64
6.5.1	Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.....	6-64
6.5.2	Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar	6-66
6.5.3	Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat.....	6-73
6.5.4	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal: Pelaksanaan Program Indonesia Kerja	6-80
6.5.5	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan yang Berkelanjutan	6-82
6.6	Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional	6-84
6.6.1	Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan.....	6-85
6.6.2	Membangun Transportasi Umum Masal Perkotaan	6-94
6.6.3	Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	6-96
6.6.4	Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur	6-103
6.6.5	Penguatan Investasi	6-106

6.6.6	Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan	6-111
6.6.7	Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi	6-113
6.6.8	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional	6-118
6.6.9	Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional.....	6-135
6.6.10	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	6-140
6.6.11	Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016	6-144
6.7	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik.....	6-145
6.7.1	Peningkatan Kedaulatan Pangan	6-145
6.7.2	Ketahanan Air	6-154
6.7.3	Kedaulatan Energi.....	6-164
6.7.4	Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	6-167
6.7.5	Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan	6-175
6.7.6	Penguatan Sektor Keuangan.....	6-180
6.7.7	Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.....	6-182
6.8	Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	6-187
6.9	Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia	6-190
BAB 7 KAIDAH PELAKSANAAN.....		7-1
7.1	Kerangka Pendanaan	7-1
7.2	Kerangka Regulasi	7-6
7.3	Kerangka Kelembagaan.....	7-10
7.4	Kerangka Evaluasi	7-17
BAB 8 PENUTUP.....		8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kebijakan dalam Memanfaatkan Bonus Demografi	3-13
Tabel 3.2 Proyeksi Penduduk Indonesia Periode 2010 – 2035	3-14
Tabel 4.1 Gambaran Ekonomi Makro.....	4-9
Tabel 4.2 Sasaran Ekonomi Nasional	4-16
Tabel 4.3 Sasaran Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi	4-17
Tabel 4.4 Perkiraan Neraca Pembayaran	4-18
Tabel 4.5 Sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	4-19
Tabel 4.6 Kebutuhan Investasi.....	4-20
Tabel 4.7 Sumber Pembiayaan Investasi Masyarakat.....	4-21
Tabel 5.1 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019	5-6
Tabel 6.1 Sasaran Tarif dan Non Tarif 2015-2019	6-8
Tabel 6.2 Sasaran Minimalisasi Dampak Global Ekonomi 2015-2019.....	6-13
Tabel 6.3 Sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana	6-65
Tabel 6.4 Sasaran Pembangunan Pendidikan.....	6-67
Tabel 6.5 Sasaran Pembangunan Kesehatan.....	6-74
Tabel 6.6 Perkiraan Investasi 2015-2019	6-106
Tabel 6.7 Sasaran Produksi Komoditas Andalan Tahun 2014-2019.....	6-119
Tabel 6.8 Sasaran Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Produksi Kayu Tahun 2015-2019	6-121
Tabel 6.9 Sasaran Pertumbuhan Industri.....	6-126
Tabel 6.10 Sasaran Pembangunan Pariwisata	6-130
Tabel 6.11 Sasaran Ekonomi Kreatif	6-132
Tabel 6.12 Sasaran Perdagangan Dalam Negeri dan Efisiensi Sistem Logistik Nasional.....	6-135



Tabel 6.13 Sasaran Perdagangan Luar Negeri.....	6-136
Tabel 6.14 Sasaran Kedaulatan Pangan Tahun 2015-2019.....	6-147
Tabel 6.15 Sasaran Ketahanan Air Tahun 2015-2019.....	6-155
Tabel 6.16 Sasaran Kedaulatan Energi Tahun 2015-2019.....	6-165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPN 2005-2025	2-3
Gambar 2.2 Indonesia diantara Negara Berpenghasilan Rendah dan Berpenghasilan Tinggi	2-8
Gambar 3.1 Perkiraan Kontribusi Pdb Negara Berkembang Terhadap PDB Dunia	3-2
Gambar 3.2 Perkiraan Aliran Netto Investasi Asing Langsung (<i>Foreign Direct Investment</i>) Global Tahun 2019	3-2
Gambar 3.3 Perkembangan Dan Perkiraan Ekspor Dunia Tahun 2012-2019	3-3
Gambar 3.4 Pergeseran Paradigma Arsitektur Kerjasama Ekonomi Global.....	3-5
Gambar 3.5 Konstelasi <i>Mega Trading Block</i>	3-5
Gambar 3.6 Proyeksi Rasio Ketergantungan Indonesia 2010-2035	3-12
Gambar 4.2 Proyeksi Tingkat Kemiskinan dan TPT 2015-2019	4-11
Gambar 5.1 Strategi Pembangunan Nasional	5-4
Gambar 6.1 Pembangunan 14 Kawasan Industri di Luar Jawa	6-128
Gambar 7.1 Siklus Perumusan Kebijakan dan Pembentukan Regulasi.....	7-9
Gambar 7.2 Perencanaan Kerangka Regulasi dalam Kerangka Lima Tahunan	7-9
Gambar 7.3 Kerangka Evaluasi RPJMN 2015 - 2019	7-20
Gambar 7.4 Keterkaitan Program/Kegiatan antar Dokumen Perencanaan.....	7-20
Gambar 7.5 Contoh Pemetaan Keterkaitan Program/Kegiatan antar Dokumen Perencanaan.....	7-21

BAB 1

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.

Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tadi, suatu perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, tetap dipandang perlu adanya tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional NKRI.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi

Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.

Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

1.1 MENEGUHKAN KEMBALI JALAN IDEOLOGIS

Daya tahan suatu bangsa terhadap berbagai deraan gelombang sejarah tergantung pada ideologi. Ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu adalah PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI. Selanjutnya penjabaran TRISAKTI diwujudkan dalam bentuk:

1. **Kedaulatan dalam politik** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat

menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.

2. **Berdikari dalam ekonomi** diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
3. **Kepribadian dalam kebudayaan** diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Dengan demikian, prinsip dasar TRISAKTI ini menjadi basis sekaligus arah perubahan berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.

1.2 SISTEMATIKA

Upaya untuk mencapai tujuan bernegara disusun melalui proses perencanaan yang dimulai dengan penyusunan Rancangan yang merupakan penjabaran dari Visi Misi dan Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden yang diintegrasikan dengan Rancangan Teknokratik yang telah disusun sebelumnya. Rancangan RPJMN 2015-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis
- 1.2 Sistematika

BAB 2 KONDISI UMUM

- 2.1 Latar Belakang
- 2.2 Permasalahan dan Tantangan

BAB 3 LINGKUNGAN STRATEGIS

- 3.1 Geo-ekonomi
- 3.2 Geo-politik
- 3.3 Bonus Demografi
- 3.4 Agenda Paska 2015 dan Perubahan Iklim

BAB 4 KERANGKA EKONOMI MAKRO

- 4.1 Kondisi Ekonomi Menjelang Akhir tahun 2014
- 4.1 Prospek Ekonomi Tahun 2015-2019
- 4.1 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

BAB 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- 5.1 Visi Misi Pembangunan
- 5.2 Strategi Pembangunan Nasional
- 5.3 Sembilan Agenda Prioritas
- 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

BAB 6 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL

- 6.1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara
- 6.2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- 6.3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
- 6.4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 6.5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
- 6.6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- 6.7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik



- 6.8 Melakukan revolusi karakter bangsa
- 6.9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

BAB 7 KAIDAH PELAKSANAAN

- 7.1 Kerangka Pendanaan
- 7.2 Kerangka Regulasi
- 7.3 Kerangka Kelembagaan
- 7.4 Kerangka Evaluasi

BAB 8 PENUTUP

BAB 2 KONDISI UMUM

2.1 LATAR BELAKANG

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Maju : berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
- Adil : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.
- Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yaitu:

- 1 **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
- 2 **Mewujudkan bangsa yang berdaya saing** dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara

berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mereformasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

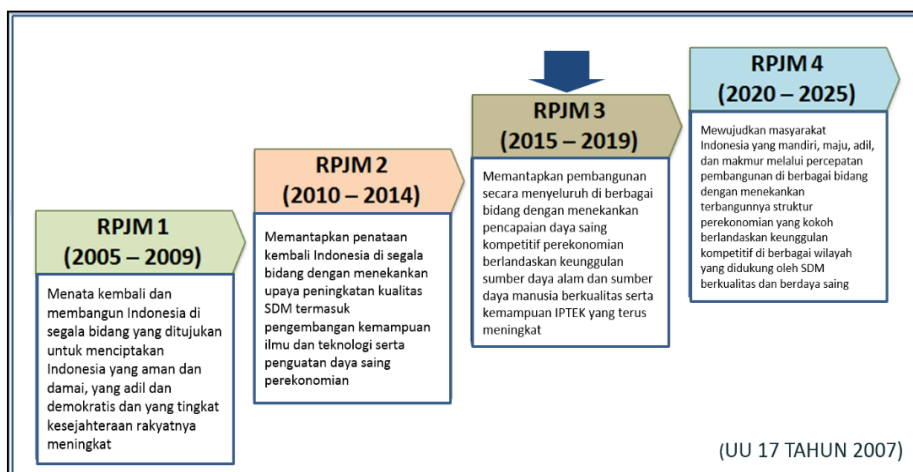
- 3 **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
- 4 **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
- 5 **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- 6 **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan

upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

- 7 **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
- 8 **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1
TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN ARAHAN KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025



Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

2.2 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.2.1 Tiga Masalah Pokok Bangsa

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Ancaman Terhadap Wibawa Negara. Wibawa negara merosot ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga negara, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah, membiarkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), lemah dalam penegakan hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik akan perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan untuk menegakkan wibawa negara semakin pudar ketika negara mengikat diri pada sejumlah perjanjian internasional yang mencederai karakter bangsa dan makna kedaulatan yang tidak memberi keuntungan pada kepentingan nasional.

Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa. Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan, dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan alam yang sangat besar, baik yang mewujud (*tangible*) maupun bersifat non-fisik (*intangible*), bagi kesejahteraan rakyatnya. Harapan akan penguatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atas utang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan

krisis energi akibat dominasi alat produksi dan modal korporasi global serta berkurangnya cadangan minyak nasional.

Intoleransi dan Krisis Kepribadian Bangsa. Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudahkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap “yang berbeda”. Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas” (*borderless-state*) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (*culture shock*) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas primordial sebagai representasi simbolik yang menjadi pembeda dengan lainnya. Konsekuensinya, bangsa ini berada di tengah pertarungan antara dua arus kebudayaan. Disatu sisi, manusia Indonesia dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primordial di tengah derasnya arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa.

2.2.2 Tantangan Utama Pembangunan

Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan

percepatan pemba-ngunan kelautan. Uraian dari masing-masing tantangan utama pembangunan ini adalah sebagai berikut:

A. Stabilitas Politik dan Keamanan

Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinnekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan nasional. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar untuk Indonesia, bukan menjadi hambatan yang menjauhkan Indonesia dari cita-citanya.

Tantangan lainnya, adalah meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintahan maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan negara dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum, khususnya Polri, juga merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun kemitraan antara masyarakat dan Polri. Melalui upaya peningkatan profesionalisme anggotanya dengan fokus pada orientasi pelayanan publik, Polri akan dapat tumbuh menjadi institusi yang disegani dan dipercaya oleh masyarakat.

Kekuatan pertahanan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan. Semakin kuatnya pertahanan Indonesia ditunjukkan dengan meningkatnya kekuatan Alutsista pada seluruh matra. Dengan peningkatan tersebut, tantangan yang harus diantisipasi adalah jaminan kesiapan Alutsista untuk operasional dan tempur dan peningkatan profesionalisme prajurit sebagai elemen utama kekuatan pertahanan.

B. Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien

Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas,

efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah dan masyarakat. Sampai saat ini masih berlangsung proses mencari bentuk pola hubungan antar lembaga yang terbaik. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan/mengurangi kewenangan DPR dalam proses pembahasan APBN merupakan contoh dari pola hubungan yang sedang berubah tersebut. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pembangunan adalah bagaimana mempercepat proses transformasi tersebut dalam membentuk pola hubungan antara parapihak dalam bentuknya yang terbaik, sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional kedepan secara efektif dan efisien.

C. Pemberantasan Korupsi

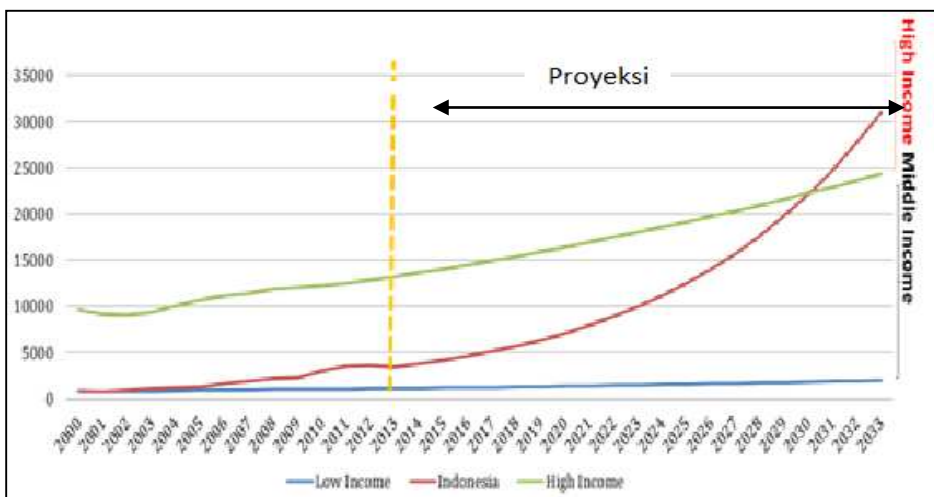
Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. Oleh karena itu korupsi dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*).

Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2013, pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai USD 3.500 yang menempatkan Indonesia berada pada lapis bawah negara-negara berpenghasilan menengah. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju (*high income*). Pada saat yang sama, batas antara negara berpenghasilan rendah dan negara berpenghasilan tinggi juga bergerak karena perekonomian global juga tumbuh. Agar Indonesia mampu menjadi negara berpendapatan tinggi, tentu memerlukan pertumbuhan yang lebih tinggi dari pertumbuhan global.

GAMBAR 2.2
INDONESIA DIANTARA NEGARA BERPENDAPATAN RENDAH DAN
BERPENDAPATAN TINGGI



Sumber: BAPPENAS – 2014

Untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6 – 8 persen pertahun. Inilah tantangan utama pembangunan ekonomi. Agar berkelanjutan, pertumbuhan yang tinggi tersebut harus bersifat inklusif, serta tetap menjaga kestabilan ekonomi.

Upaya mencapai tujuan tersebut memerlukan penerapan strategi yang cermat dan tepat, serta memerlukan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi ekonomi yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif akan dicapai dengan dukungan reformasi yang menyeluruh (*comprehensive reform*).

Kinerja perekonomian Indonesia yang digambarkan dengan produk domestik bruto (PDB) masih di bawah yang seharusnya dapat dicapai apabila seluruh potensi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi dan produktivitas dalam kinerja perekonomian Indonesia yang ditunjukkan oleh *Total Factor Productivity (TFP)*.

Masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahalnya biaya logistik.
2. Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat. Padahal agar perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan harus menjadi motor penggerak.
3. Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, pusat dan daerah, telah menjadi kendala untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju karena saling tumpang tindih dan terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang lain. Peraturan perundangan tersebut perlu direformasi.
4. Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal dan kualitas barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat terbatas, sehingga daya saing usaha tidak seperti yang diharapkan.
5. Kemampuan untuk membiayai pembangunan terbatas. Hal ini terkait dengan upaya untuk menggali sumber-sumber penerimaan masih belum optimal. Disamping itu anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti subsidi BBM masih sangat besar. Menggali sumber-sumber penerimaan dan mengefektifkan pengeluaran pembangunan menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Pencapaian tujuan dan prospek ekonomi juga dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi global yang akan dihadapi pada periode tahun 2015-2019. Beberapa hal yang terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu dicermati diantaranya adalah:

1. Mulai diberlakukannya *The ASEAN Community* pada tahun 2015. Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi;
2. Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia, (b) perekonomian Asia diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor mau-pun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal jangka panjang maupun jangka pendek; dan
3. Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati untuk masa lima tahun mendatang, yaitu: (a) krisis di kawasan Eropa beberapa tahun terakhir yang kondisinya masih belum pulih atau masih dalam posisi *mild recovery* dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, sehingga akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (b) harga komoditas dunia masih menunjukkan tren penurunan ataupun *flat* dan adanya indikasi berakhirnya era *supercycle* juga akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (c) proses normalisasi kebijakan moneter AS di tahun 2014 dan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* di tahun-tahun berikutnya.

E. Percepatan Pemerataan dan Keadilan

Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan. Hal ini dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di

dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Ukuran kualitas pekerjaan berdasarkan status pekerjaan rumah tangga di atas, memberikan gambaran tentang kondisi pekerjaan dan kerentanan kehidupan masih mewarnai pekerjaan yang menyumbang sekitar 65,8 persen dari pekerja. Sehingga wajar jika pertumbuhan kelompok 40 persen terbawah relatif rendah, dibawah rata-rata nasional. Dengan kondisi seperti ini, laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,0-7,0 persen per tahun akan tetap menempatkan persoalan tenaga kerja menjadi masalah penting pembangunan. Pertumbuhan ekonomi setinggi demikian relatif hanya menguntungkan beberapa kelompok tertentu, setidaknya tenaga kerja upahan.

Dengan demikian upaya mengisolasi persoalan tenaga kerja pada mereka yang menganggur dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, serta peningkatan akses dan produktivitas mesti segera diupayakan jalan keluarnya. Untuk itu, tantangan dalam menghilangkan kesenjangan pembangunan yang mampu meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial adalah:

1. **Menciptakan pertumbuhan inklusif.** Pola pertumbuhan inklusif memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik (*Decent Work*) dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong perbaikan pemerataan, dan pengurangan kesenjangan. Terciptanya dukungan terhadap perekonomian inklusif dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja;
2. **Memperbesar investasi padat pekerja.** Terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk. Diperlukan investasi baru untuk terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja baru untuk menyerap seluas-luasnya angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SLTP;
3. **Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro.** Usaha mikro perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, permodalan, dan akses pasar yang bagus. Dukungan semacam ini perlu diberikan mengingat sebagian besar usaha

mikro tidak memiliki lokasi permanen dan tidak berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya untuk tumbuh kembang;

4. **Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal.** Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan pekerja rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk ini umumnya memiliki kesempatan terbatas dalam sektor formal dan tidak memiliki sumber-sumber alternatif untuk menghidupi ekonomi keluarga. Peluang kerja yang dapat diakses kelompok penduduk ini kurang dapat memenuhi standar hidup yang layak dan tidak berkesinambungan. Keterpaduan berbagai asistensi sosial untuk mendukung penduduk kurang mampu agar dapat mengelola berbagai risiko, pembukaan kesempatan dan lingkungan yang inklusif agar masyarakat kurang mampu memiliki penghidupan yang layak, dan jaminan sosial yang memadai;
5. **Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu.** Perluasan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas hidup terutama bagi masyarakat kurang mampu. Pemenuhan hak dasar ini meliputi hak untuk mendapatkan identitas/legalitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, akses terhadap pendidikan, rumah tinggal yang layak, penerangan yang cukup, fasilitas sanitasi, dan akses terhadap air minum. Tantangan dalam hal pemenuhan hak dan kebutuhan dasar ini menyangkut ketersediaan layanan dasar (*supply side*), penjangkauan oleh masyarakat miskin (*demand side*), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik;
6. **Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian.** Isu lain yang masih tertinggal dan memerlukan perhatian adalah upaya meningkatkan produktivitas pertanian petani miskin, usaha perikanan tangkap maupun budi daya, dan usaha skala mikro lainnya yang menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi potensi di wilayah. Perhatian juga perlu ditujukan pada peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif yang seringkali membatasi peningkatan produksi dan skala usaha masyarakat kurang mampu. Ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, akses pada kredit jasa keuangan dan sumber permodalan lainnya bagi pelaku ekonomi di pedesaan, serta pemanfaatan riset dan teknologi pertanian, diseminasi dan penyediaan informasi teknologi

pertanian juga menjadi faktor penting dalam mendorong ekonomi perdesaan; dan

7. **Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.** Kelompok masyarakat kurang mampu, rentan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Untuk itu, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga. Selain itu, perlu untuk memonitor perkembangan harga bahan makanan dan menjaga ketersediaan bahan pokok melalui operasi pasar. Perlunya membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar.

F. Keberlanjutan Pembangunan

Ada beberapa tantangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara konkrit ke dalam berbagai bidang dan daerah, yaitu:

1. Masih perlu adanya kesamaan dan meluasnya pemahaman oleh berbagai pemangku kepentingan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan pada seluruh aspek kehidupan;
2. Pengembangan data dan ukuran pembangunan berkelanjutan serta pencerminannya ke dalam kegiatan konkrit, baik pada dimensi lingkungan hidup, dimensi ekonomi, maupun pada dimensi sosial yang tercermin pada perilaku berkelanjutan;
3. Pentingnya pengembangan dan dorongan penerapan kegiatan ramah lingkungan yang tercermin pada efisiensi penggunaan sumber daya dan menurunnya limbah, penguatan pemantauan pencemaran termasuk fasilitasi dan dukungan perluasannya;
4. Pengembangan tata kelola yang mendorong penggunaan sumberdaya dan teknologi bersih, termasuk langkah-langkah pengendalian pencemaran dan upaya penegakan hukum yang disertai dengan pengembangan kapasitas institusi dan SDM secara keseluruhan.

G. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Tantangan pembangunan SDM meliputi:

1. Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah dalam meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan *provider* dan pengelolaan jaminaan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional;
2. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial-ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran dan sistem penilaian dalam pendidikan;
3. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkuat karakter dan jatidiri bangsa adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi

budaya antarnegara; dan meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;

4. Tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarus-utamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah; dan
5. Tantangan dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya adalah merubah sikap permisif masyarakat dan praktek budaya yang toleran terhadap kekerasan dan perlakuan salah lainnya, serta melaksanakan sistem perlindungan perempuan dan anak secara terkoordinasi dan menyeluruh mulai dari upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

H. Kesenjangan Antar Wilayah

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan ke depan. Selama 30 tahun (1982-2012) kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat dominan, yaitu sekitar 80 persen dari PDB, sedangkan peran Kawasan Timur Indonesia (KTI) baru sekitar 20 persen. Kesenjangan pembangunan antarwilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Kesenjangan antarwilayah juga dapat dilihat dari masih terdapatnya 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.

I. Percepatan Pembangunan Kelautan

Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang sangat besar, percepatan pembangunan kelautan merupakan tantangan yang harus diupayakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang dihadapi antara lain adalah perlunya penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional perlu diperkuat sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut yang telah diratifikasi. Tantangan utama lainnya adalah bagaimana mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut dan peningkatan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya menjaga daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut juga merupakan tantangan dalam pembangunan kelautan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 3

LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1 GEO-EKONOMI

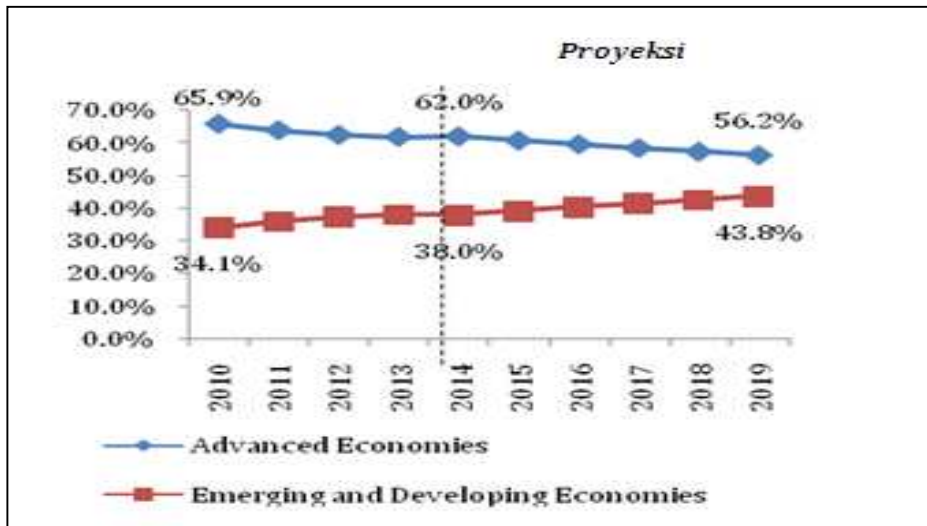
Kondisi geoekonomi global tetap akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perekonomian Indonesia dalam lima tahun ke depan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah:

Pertama, proses pemulihan ekonomi global saat ini diperkirakan akan berlangsung secara moderat. Hal ini karena proses pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang berlangsung secara bertahap dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa yang diperkirakan akan tetap lemah dan rentan akibat masih tingginya tingkat utang dan fragmentasi keuangan yang menahan laju permintaan domestik. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan akan cenderung moderat, dan Jepang akan menghadapi risiko fiskal jangka menengah disebabkan oleh besarnya obligasi pemerintah dan belum adanya rencana penyesuaian ekonomi jangka menengah.

Kedua, pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia Pasifik. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang cukup tinggi akan mengakibatkan negara berkembang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara berkembang terhadap PDB Dunia pada tahun 2019 diperkirakan akan mencapai 43,8 persen; dimana pada tahun 2010 hanya sebesar 34,1 persen.

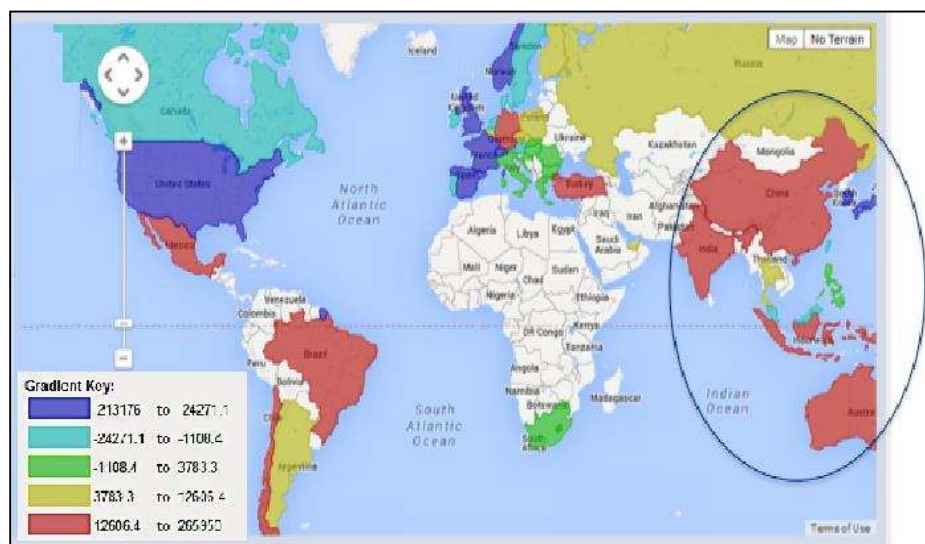
Hal tersebut mengakibatkan aliran modal asing ke negara berkembang diperkirakan akan terus meningkat, terutama negara berkembang di kawasan Asia dan Amerika Latin. Faktor utama yang mempengaruhi aliran modal asing ke negara berkembang adalah potensi pasar yang cukup besar, pertumbuhan ekonomi yang baik, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara berkembang, seperti: ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku dan tenaga kerja sebagai faktor produksi.

GAMBAR 3.1
PERKIRAAN KONTRIBUSI PDB NEGARA BERKEMBANG
TERHADAP PDB DUNIA



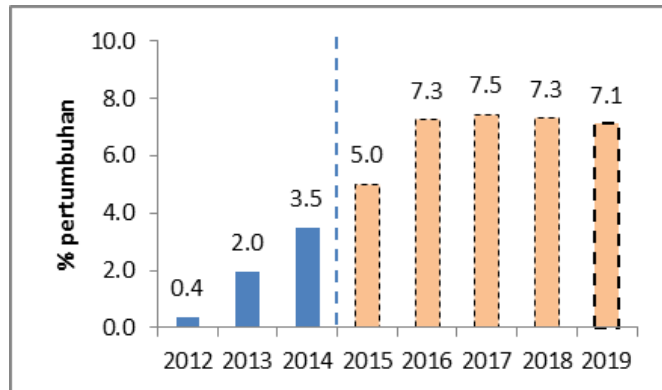
Sumber: Bappenas, Oxford Economic Model

GAMBAR 3.2
PERKIRAAN ALIRAN NETTO INVESTASI ASING LANGSUNG
(FOREIGN DIRECT INVESTMENT) GLOBAL TAHUN 2019



Sumber: Bappenas-Oxford Economic Model (Baseline Scenario).

GAMBAR 3.3
PERKEMBANGAN DAN PERKIRAAN EKSPOR DUNIA TAHUN 2012-2019



Sumber : Bappenas – Oxford Economic Model (Baseline Scenario)

Selain itu, pertumbuhan ekspor negara berkembang akan semakin kuat, seiring dengan momentum pemulihan perdagangan global. Rantai suplai global dan regional pun akan terus berkembang, karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi akan menyebabkan fragmentasi rantai produksi dapat meningkatkan efisiensi proses produksi. Kondisi ini akan memengaruhi dinamika *Foreign Direct Investment* (FDI) antarnegara dan tren integrasi perdagangan sehingga akan mendorong ekonomi untuk meningkatkan perdagangan dan investasi.

Ketiga, tren perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang, tetapi juga oleh perdagangan jasa yang diperkirakan akan terus meningkat dan menjadi bagian penting dari mesin pertumbuhan global. Perkembangan jaringan produksi regional dan global yang mendorong peningkatan *intra-industry trade* antar negara pemasok akan menjadi alasan utama terjadinya peningkatan perdagangan jasa antar negara. Hal ini tentunya karena salah satu peranan jasa adalah sebagai faktor pendukung dan penunjang proses produksi, seperti: jasa logistik dan distribusi, jasa transportasi, dan jasa keuangan.

Keempat, harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga produk manufaktur dalam tren meningkat. Bank Dunia memperkirakan indeks harga komoditas energi akan turun dari 123,2 pada tahun 2015 menjadi 121,9 pada tahun 2019. Di sisi lain, indeks harga komoditas non-energi diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan yang relatif konstan. Di sisi lain, indeks harga produk manufaktur akan meningkat dari 109 pada

tahun 2015 menjadi 115,4 pada tahun 2019 (Sumber: Bank Dunia, *Commodity Price Forecast*). Hal ini tentunya menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspornya, dari berbasis komoditas menjadi berbasis manufaktur.

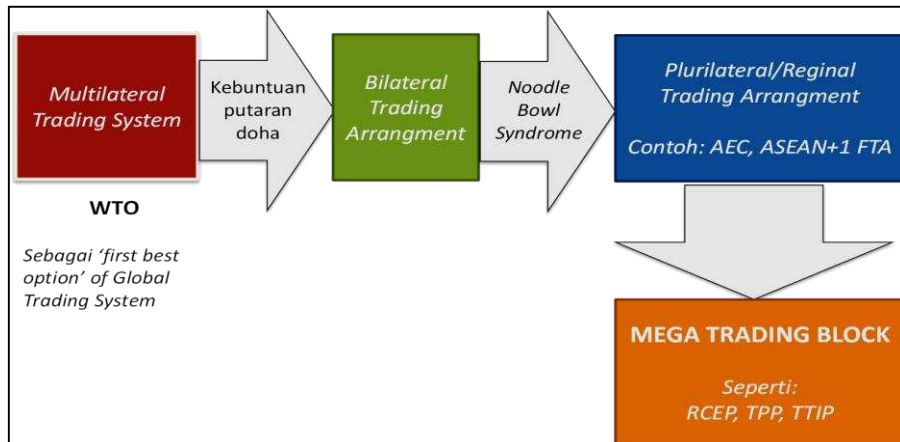
Kelima, semakin meningkatnya hambatan non tarif di negara tujuan ekspor. Hal ini merupakan salah satu akibat dari krisis global yang terjadi beberapa tahun lalu yang memicu kecenderungan masing-masing negara untuk mengamankan pasar domestiknya melalui upaya penerapan hambatan perdagangan yang berupa *non tariff measures* (NTMs) dan *non tariff barriers* (NTBs). Dalam 12 bulan ke belakang, jumlah NTMs di dunia meningkat dengan sangat pesat, seperti berupa *Sanitary-and-Phytosanitary measures* dan *export taxes/restriction*. Dilihat dari sebaran geografisnya, NTMs banyak diterapkan oleh Uni Eropa, India, Rusia dan Amerika Latin.

Keenam, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan dimulai tanggal 31 Desember 2015. Dengan MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antarnegara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan Indonesia perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia untuk meraih keberhasilan MEA 2015 bagi kepentingan pembangunan nasional.

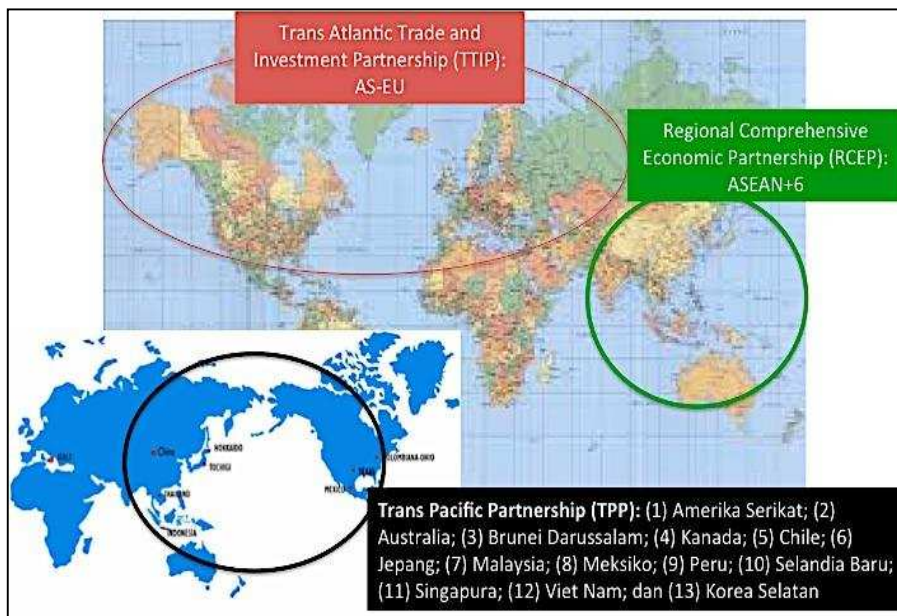
Ketujuh, pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok. Hal ini bermula dari kesadaran bahwa kerjasama *plurilateral* dapat mengurangi kerumitan yang terjadi (*noodle bowl syndrome*) akibat banyaknya kesepakatan bilateral. Pergeseran paradigma arsitektur kerjasama ekonomi global tidak berhenti pada tingkat plurilateral, karena saat ini telah berkembang keinginan negara-negara untuk membangun konstelasi kerjasama ekonomi yang lebih luas. Tiga kesepakatan kerjasama ekonomi yang sedang dalam proses perundingan diperkirakan akan menjadi tiga Mega Blok Perdagangan (*Mega Trading Block*), yaitu: TPP (*Trans Pacific Partnership*) yang saat ini beranggotakan 13 negara Asia dan Pasifik, TTIP (*Trans Atlantic Trade and Investment Partnership*) yang terdiri dari Amerika dan EU (*European Union*), dan RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*) yang terdiri

dari 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra ASEAN. Ketiga mega blok perdagangan ini diperkirakan akan menjadi penentu arsitektur perdagangan dan investasi global.

GAMBAR 3.4
PERGESERAN PARADIGMA ARSITEKTUR KERJASAMA EKONOMI GLOBAL



GAMBAR 3.5
KONSTELASI MEGA TRADING BLOCK



Kondisi geo ekonomi ke depan tentunya perlu disikapi dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang tepat, agar peluang yang terbuka dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan bidang ekonomi perlu diarahkan untuk meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan titik berat pada transformasi industri yang berkelanjutan, sehingga perekonomian Indonesia akan berbasis kepada nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Perkiraan pelemahan harga komoditas di pasar internasional menjadi tantangan penting bagi Indonesia untuk segera menggeser struktur ekspor Indonesia ke arah produk manufaktur. Sementara itu, peningkatan jaringan rantai suplai global dan regional pun perlu dimanfaatkan oleh Indonesia melalui kebijakan kondusif, yang dapat membuka peluang yang lebih besar bagi pengusaha domestik termasuk usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dalam rantai suplai internasional.

Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Titik berat peningkatan daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, serta tata kelola birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Peningkatan daya saing perekonomian ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan rente ekonomi maupun ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititik-beratkan pada upaya untuk meningkatkan konektivitas nasional, sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah di Indonesia.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kom-petensi pekerja agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN maupun internasional.

Di sisi hubungan internasional, diplomasi ekonomi internasional diarahkan untuk mengedepankan kepentingan nasional yang dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi hambatan perdagangan di pasar tujuan ekspor, serta meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Sementara itu, keikutsertaan dan partisipasi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas maupun kemitraan ekonomi akan dilakukan secara selektif, yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

3.2 GEO-POLITIK

3.2.1 Konstelasi Geo-politik Global

Konstelasi geo-politik global akan menjadi tantangan, khususnya bagi negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia. Amerika Serikat masih merupakan kekuatan utama dunia. Upaya penyeimbangan kembali oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik (*Rebalancing Asia Pacific*) merupakan salah satu perkembangan geo-politik saat ini. Perluasan kekuatan pertahanan dan keamanan Amerika Serikat dilakukan dengan menggelar lebih banyak armada di Kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Amerika Serikat juga memperkuat kerja sama militer dengan Australia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Singapura, India, New Zealand, Vietnam dan Indonesia; dan mengupayakan kerjasama militer dengan Tiongkok. Dalam membentuk aliansi kekuatan ekonomi, Amerika Serikat juga berperan dalam menggalang keikutsertaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk bergabung dalam *Trans Pacific Partnership (TPP)*, meningkatkan bantuan luar negeri ke Asia Pasifik, serta meningkatkan volume perdagangan dengan negara di Asia Pasifik.

Eropa Barat juga merupakan aktor besar yang dapat memengaruhi percaturan politik global. Peran negara-negara Eropa Barat dalam persoalan di Timur Tengah (*Arab Spring*), persoalan nuklir di Iran, dan penyelesaian sengketa di kawasan Afrika sangatlah signifikan.

Kekuatan baru Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduknya yang besar, serta peningkatan kekuatan militernya menandai peta politik ekonomi global dan regional. Tiongkok telah meluaskan pengaruhnya di Afrika dengan memasarkan produk-produknya dan melakukan pendekatan budaya antara lain seperti bahasa. Pengaruh Tiongkok terhadap masyarakat internasional semakin menguat dan diperkirakan akan tetap menguat dalam lima tahun ke depan. Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menyeimbangkan kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok melalui strategi diplomasi, kerja sama ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Perhatian yang besar dari Amerika Serikat terhadap persoalan Laut Tiongkok Selatan diidentifikasi sebagai salah satu strategi Amerika Serikat untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok.

Australia merupakan aktor yang semakin penting dalam peta politik di kawasan Pasifik Barat. Australia juga memiliki kekuatan seperti politik, ekonomi, militer dan teknologi sebagaimana negara-negara barat. Australia memposisikan Asia sebagai peluang pasar

antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, perdagangan dan sosial budaya. Posisi tawar Australia dalam percaturan politik global ditandai pula dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menduduki posisi No. 2 pada tahun 2013. Kebijakan Australia terhadap Asia tidak lepas dari cara pandangannya terhadap pergeseran geo-strategi dunia ke Asia Pasifik, yang saat ini dan ke depan akan menjadi penggerak ekonomi dunia.

Konstelasi politik global ditandai pula dengan munculnya aktor non-negara yang memiliki kapasitas dan jejaring internasional. Terorisme global merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara yang masih akan dihadapi. Perkembangan teknologi canggih dalam bidang informasi, komunikasi, bahan peledak (*explosive*) dan transportasi telah meningkatkan dampak dan keberhasilan aksi terorisme.

Kondisi geografi Indonesia yang terbuka menjadi peluang bagi negara lain masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, peredaran narkoba, perdagangan manusia, eksploitasi ilegal sumber daya alam seperti kayu, produk kayu dan kertas merupakan bentuk-bentuk ancaman terhadap kehidupan masyarakat dan berdampak pula pada kerugian ekonomi.

Perubahan situasi geo-politik global juga ditandai dengan 'pertarungan' penguasaan sumber daya alam dalam rangka *food and energy security*. Krisis energi dunia dipicu oleh kian menipisnya cadangan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Begitu pula dengan pengalihfungsian sumber pangan pokok seperti jagung, tebu/gula, dan gandum menjadi sumber energi alternatif yang menimbulkan dampak krisis pangan dunia. Akibatnya adalah terjadinya peningkatan harga pangan dunia dan arus ekspor-impor pangan dalam jumlah besar. Kondisi ini memperlihatkan terjadinya kompetisi penyediaan energi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional (aturan main dalam rezim internasional). Dalam bidang perdagangan, sejumlah negara menerapkan strategi hambatan non-tarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam konteks penguasaan sumber daya alam, bahkan persaingan negara besar dan negara industri baru ditandai dengan strategi eksplorasi dan akuisisi lahan ke benua lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara yang secara ekonomi lebih kaya dan kuat.

Globalisasi nilai-nilai budaya tidak dapat dihindarkan, yang sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi yang dapat menembus dan menyingkirkan sekat-sekat

geografi. Internet dan media sosial tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di tingkat global, regional dan nasional, tetapi juga memicu perubahan paradigma dalam politik, ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang melampaui batasan kebangsaannya. Globalisasi tidak hanya berdampak pada masuknya budaya global ke Indonesia, tetapi juga berdampak pada penguatan ikatan primordial. Hal ini membawa Indonesia berada pada persilangan antara budaya global dan budaya lokal yang berorientasi pada identitas primordial.

Hal lain, kesadaran bersama untuk membangun tata kelola global (*global governance*) dan bangunan bersama global (*global architecture*) telah muncul dalam komunitas masyarakat internasional. Namun, kesadaran tersebut pada akhirnya selalu berbenturan dengan kepentingan nasional negara masing-masing, sebagaimana digambarkan dalam peta politik global di atas. Satu hal yang saat ini muncul dan ke depan akan semakin intensif adalah indikasi perang teknologi informasi untuk memperlemah kemampuan pertahanan negara lain. Strategi yang dilakukan adalah melakukan sabotase, peretasan dan spionase terhadap sistem komputer, dan sistem pertahanan.

3.2.2 Lingkungan Geo-politik Regional

Dunia mengalami proses perubahan situasi global yang ditandai dengan pergeseran hegemoni negara-negara Barat menuju pada kebangkitan ekonomi negara-negara Timur. Pergeseran ini tidak lepas dari strategi negara-negara Timur menyiasati globalisasi, yakni memanfaatkan momentum krisis yang melanda negara-negara Barat dan memantapkan nasionalisme di dalam negerinya dengan melakukan proteksi terhadap potensi geo-politik dan geo-ekonomi dari berbagai bentuk intervensi asing. Bahkan, beberapa negara di Asia Timur dapat mengambil keuntungan untuk memperkuat basis ekonomi dan politik domestiknya.

Dengan pergeseran gravitasi geo-strategi dunia ke Asia Pasifik, kawasan ini menjadi pengendali kunci politik global karena kurang lebih 41 persen penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 persen transaksi dunia terjadi di kawasan ini.

Bagi Indonesia, stabilitas dan kemanan kawasan perlu dipelihara agar dapat melaksanakan pembangunan dengan baik tanpa gangguan. Sekalipun tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu terus mengantisipasi perkembangan konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Negara-negara yang terlibat dalam klaim atas LTS ini adalah

antara lain Filipina, Vietnam, Brunai Darusalam, Malaysia, dan Taiwan. Kawasan Laut Tiongkok Selatan ini memiliki potensi kandungan minyak dan gas yang besar. Cadangan minyak di kawasan ini mencapai 12 persen dari produksi dunia (BP, *Energy Outlook 2013*) dengan kapasitas produksi 2,5 juta barel per hari (*Japan Foundation, 2013*).

Selain kawasan LTS, yang perlu mendapatkan perhatian dan respon yang serius adalah kawasan Samudera Hindia. Kawasan ini merupakan penghubung antara Asia dan Afrika serta sebagai jembatan menuju Eropa. Kawasan Samudera Hindia mengandung potensi besar dan peluang bisnis yang menguntungkan bagi Indonesia untuk melakukan investasi dan kerja sama perdagangan di bidang pertanian, produk makanan, sektor konstruksi, energi, pertambangan, perikanan dan sebagainya. Kawasan ini dapat dikembangkan menjadi sumber kerja sama bagi semua negara dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran Indonesia.

Secara geografis Indonesia masih menghadapi masalah perbatasan di laut dengan negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste dan Australia. Sedangkan batas darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Timor-Leste dan Papua Nugini. Sekalipun upaya perundingan perbatasan telah dilakukan dan menghasilkan kemajuan yang signifikan, persoalan perbatasan ini masih menyisakan potensi konflik yang cukup besar. Masih terdapat sembilan segmen batas darat dengan Malaysia yang belum disepakati (*Outstanding Boundary Problem*) dan dua segmen batas *unresolve* dengan Timor Leste di Provinsi NTT.

Hal lain, berbagai negara Asia Pasifik telah mengembangkan dan memperkuat kekuatan maritimnya, seperti Tiongkok, India, Malaysia, dan Singapura. Pemerintah Australia melihat hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi salah satu pertimbangan yang dapat mempengaruhi keamanan kawasan.

Indonesia secara geo-politik akan menghadapi kepentingan negara-negara terdekat dalam lingkaran konsentriknya seperti negara-negara anggota ASEAN dan Asia Pasifik, negara-negara yang bekepentingan dengan sumber daya alam termasuk perikanan, negara-negara yang memiliki armada niaga besar, memiliki kekuatan maritim, dan negara-negara besar dalam rangka mencapai tujuan global strateginya.

3.2.3 Lingkungan Strategis Nasional

Di antara negara-negara tetangga, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar dalam konteks regional, dan terbesar ketiga di dunia. Pada konteks geo-politik nasional, Indonesia menghadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demokrasi dan kemajuan Indonesia. Sepanjang sejarah negara ini, Indonesia menghadapi fakta bahwa kebhinekaan bangsa dari segi geografis, etnis, kebudayaan, agama telah menjadi modalitas dan unsur-unsur penguat bangunan bangsa Indonesia. Pendiri bangsa Indonesia secara positif berhasil menjadikan perbedaan-perbedaan dalam unsur pembentuk bangsa Indonesia sebagai potensi yang memperkaya Indonesia, terutama dalam menjadikan Indonesia faktor penting dalam konteks regional maupun global. Namun, sejarah juga mencatat bahwa perbedaan dapat dieksploitasi menjadi faktor yang berpotensi untuk merenggangkan, bahkan memecah ikatan persaudaraan kebangsaan. Bahkan tidak jarang, faktor yang merenggangkan adalah kepentingan politik-ideologis yang datang dari luar Indonesia, termasuk persaingan Blok Barat-Blok Timur dan perang dingin di masa lalu, dan pada masa sekarang menghadapi pengaruh gagasan ideologi tertentu yang membenarkan tindakan terorisme untuk mendirikan negara baru melawan Pancasila.

Tantangan ke depan adalah menguatkan dan memantapkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat menjamin semua kelompok yang ada di Indonesia, dengan mengutamakan nilai-nilai toleransi dan non-diskriminasi. Konflik-konflik vertikal dan horizontal yang berdimensi kekerasan harus dicegah secara serius apabila Indonesia ingin melakukan konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.

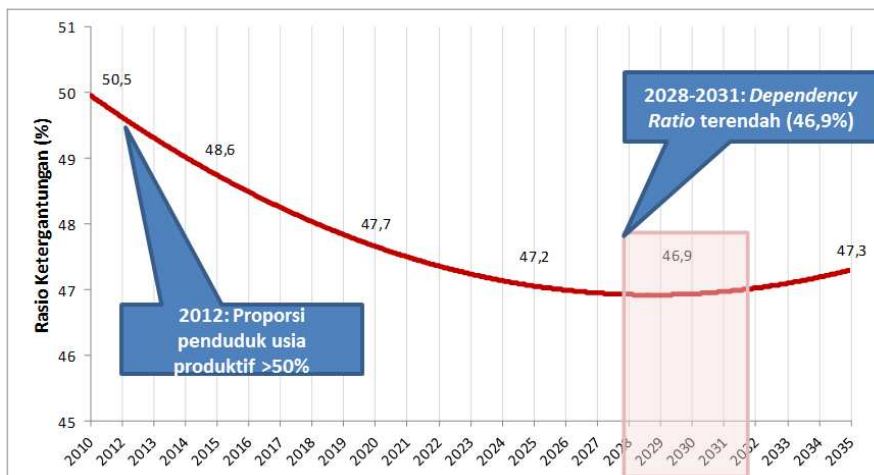
Terorisme adalah ancaman langsung pada nilai-nilai demokrasi karena menggunakan kekerasan dalam mengekspresikan kepentingan politik dan ketidakpuasan para pengikutnya. Terorisme menimbulkan kekacauan dan ketakutan yang meluas dalam kerangka besar untuk melawan negara Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal regulasi, Indonesia berada di tengah antusiasme yang besar dari beberapa negara untuk menyelenggarakan reformasi regulasi. Dalam kaitan ini, kebijakan utama yang harus dilakukan adalah menyelenggarakan reformasi regulasi guna mewujudkan sistem regulasi yang sederhana dan tertib, serta lebih mampu mendorong kinerja perekonomian secara efisien. Reformasi regulasi dimaksudkan agar Indonesia tidak menjadi pasar bagi produk negara ASEAN lainnya.

3.3 BONUS DEMOGRAFI

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati 'bonus demografi', yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46,9 persen antara tahun 2028 dan 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi baik secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.

GAMBAR 3.6
PROYEKSI RASIO KETERGANTUNGAN INDONESIA 2010-2035



Sumber data: Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035. Rasio ketergantungan dihitung dari jumlah penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65+ dibagi dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun)

Bonus demografi tidak diperoleh secara otomatis, tetapi harus diupayakan dan diraih dengan arah kebijakan yang tepat. Berbagai kebijakan yang tepat diperlukan untuk menyiapkan kualitas

sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja; menjaga penurunan fertilitas; menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; dan kebijakan ekonomi dalam mencipta-kan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, keterbukaan perdagangan dan tabungan serta dukungan sarana dan prasarana.

TABEL 3.1
KEBIJAKAN DALAM MEMANFAATKAN BONUS DEMOGRAFI

Bidang Pembangunan	Kebijakan Strategis
Sosial Budaya dan Kehidupan Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga penurunan tingkat fertilitas • Meningkatkan jaminan kesehatan • Memperluas pendidikan menengah universal • Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi • Meningkatkan pelatihan ketrampilan angkatan kerja melalui kualifikasi dan kompetensi, memperbanyak lembaga pelatihan dan relevansi pendidikan dengan pasar kerja • Meningkatkan kewirausahaan, pendidikan karakter pemuda
Ekonomi dan Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan kerjasama global dengan memperhatikan dimensi sosial dan budaya • Memperluas lapangan kerja • Meningkatkan iklim investasi dan promosi ekspor • Meningkatkan sinergi arah kebijakan industri • Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja serta pengembangan sistem kerja yang layak • Pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja • Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Menjamin ketersediaan pangan dengan memperhatikan perubahan pola konsumsi dan budaya lokal masyarakat; • Menjamin ketersediaan energi untuk industri;
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • IPTEK untuk meningkatkan produktifitas kerja • Meningkatkan insentif pajak bagi penelitian dan pengembangan
Politik, Hukum dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan partisipasi angkatan kerja di tingkat regional; • Menjamin hak-hak dan partisipasi seluruh penduduk pada pembangunan ekonomi (<i>inclusive growth</i>) • Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan kerjasama luar negeri
Pembangunan Wilayah, Tata Ruang dan Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan pusat pertumbuhan dengan memperhatikan struktur angkatan kerja dan inter-konektifitas antar-wilayah • Penataan ruang menghadapi urbanisasi • Meningkatkan sarana yang mendukung mobilitas dan produktivitas

Bonus demografi yang dialami Indonesia juga disertai dengan dinamika kependudukan lain yang juga berdampak luas, yaitu: (1) meningkatnya jumlah penduduk; (2) penuaan penduduk (*population ageing*) yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia; (3) urbanisasi yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk perkotaan; dan (4) migrasi yang ditandai dengan meningkatnya perpindahan penduduk antardaerah. Selain itu pertumbuhan dan perubahan struktur penduduk yang tidak sama antarprovinsi, sehingga pemanfaatan bonus demografi tersebut harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kewilayahan. Untuk itu, peluang bonus demografi ini juga harus diketahui dan dipahami dengan baik oleh seluruh pemangku kebijakan di daerah sehingga dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

TABEL 3.2
PROYEKSI PENDUDUK INDONESIA PERIODE 2010 – 2035

	2010	2015	2020	2025	2030	2035	Perubahan 2010-2035 (%)
Penduduk usia 0-14 th, juta	68,1	69,9	70,7	70,0	67,9	65,7	-3,5
Usia Kerja (15-64 th), juta	158,5	171,9	183,5	193,5	201,8	207,5	30,9
Penduduk Lansia (60+), juta	18,0	21,7	27,1	33,7	41,0	48,2	172,3
Penduduk usia 65+, juta	11,9	13,7	16,8	21,3	26,7	32,4	167,8
Jumlah total, juta	238,5	255,5	271,1	284,8	296,4	305,7	28,2
Penduduk di perkotaan (%)	49,8	53,3	56,7	60,0	63,4	66,6	33,4
Rasio Ketergantungan (%)	50,5	48,6	47,7	47,2	46,9	47,3	-7,4

Sumber Data: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jumlah penduduk pada tahun 2010 merupakan data per Juni 2010

Apabila tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi tidak akan dapat diraih, bahkan dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Penduduk yang besar akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan dan energi serta kelestarian dan kualitas lingkungan. Pertumbuhan penduduk lanjut usia (*population ageing*) memerlukan jaminan perlindungan sosial, perlindungan hari tua dan pelayanan penyakit ketuaan (*senescent diseases*) dan degeneratif. Urbanisasi dan migrasi menuntut ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai dan pada saat yang sama berpotensi memunculkan konflik sosial, pengangguran dan kriminalitas. Tingginya kepadatan penduduk juga berpotensi

meningkatkan polusi dan penyebaran berbagai penyakit menular. Oleh karena itu, kebijakan sumber daya manusia, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan sumber daya alam serta politik hukum dan keamanan harus diarahkan dengan tepat untuk meraih bonus demografi.

3.4 AGENDA PASCA 2015 DAN PERUBAHAN IKLIM

Pembangunan berkelanjutan merupakan elemen strategis dalam RPJMN 2015-2019 dan penjabaran konkrit ke dalam bidang-bidang yang relevan akan dilakukan. Lingkungan strategis sisi global adalah adanya Agenda Pembangunan Paska 2015 dan pengawasan perubahan iklim.

Proses penyusunan Rencana Agenda Pembangunan Global Paska 2015 sudah dimulai sejak tahun 2012. Keterlibatan Indonesia secara langsung dimulai oleh penunjukan Presiden Indonesia oleh Sekjen PBB sebagai salah satu anggota *Co-Chair High Level Panel of Eminent Person*, untuk memberikan masukan tentang Agenda Pembangunan Paska 2015. Selanjutnya, Indonesia juga terlibat melalui berbagai forum yang menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Paska 2015, yaitu menjadi salah satu *Co-Chair* dalam Penyusunan Konsep Kerjasama Global (*Global Partnership*) sebagai kerangka pelaksanaan Agenda Paska 2015. Indonesia juga menjadi salah satu dari tiga puluh negara yang menjadi anggota *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDG)*. Indonesia juga terlibat Forum Tenaga Ahli (*Expert Forum*) penyusunan Konsep Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, yang menyusun langkah-langkah pembiayaan untuk pelaksanaan Agenda Pembangunan Paska 2015.

Di dalam OWG untuk Penyusunan Agenda Paska 2015, sebagai kelanjutan dari KTT Bumi di Rio+20 tahun 2012, disepakati prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDG untuk masukan Agenda Paska 2015, yaitu: (1) SDG tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian *Millenium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen MDG yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) SDG akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) SDG akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*environment development*)

secara berimbang dan terpadu; dan (4) SDG akan menjadi bagian koheren dan terintegrasi dalam Agenda Pembangunan Paska-2015.

Dalam kaitan dengan penyusunan RPJMN 2015-2019, maka perkembangan substansi dalam berbagai forum global tersebut akan diselaraskan dan kepentingan pembangunan nasional akan menjadi dasar usulan Agenda Pembangunan Paska 2015 dari Indonesia, pada waktu proses pembahasan antar negara pada September 2014-September 2015. Beberapa fokus dalam SDG yang akan memberi warna penting dalam Agenda Pembangunan Paska 2015 adalah bahwa: (i) pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender yang sangat mewarnai MDGs akan tetap dilanjutkan. Dalam kaitan ini terdapat fokus baru yang menjawab perkembangan global yang ada yaitu masalah kesenjangan baik di dalam negara maupun antar negara. Selain itu, masalah gender dan anak-anak, tidak saja anak perempuan namun juga anak laki-laki; (ii) pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi tetap menjadi isu penting, dan akses terhadap energi merupakan fokus baru yang ditambahkan; (iii) untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian dan kota berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; (iv) pembangunan lingkungan yang tercermin pada fokus mitigasi kepada perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; dan terakhir adalah adanya rumusan cara pencapaian (*means of implementation*).

Dalam kaitan dengan perubahan iklim, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak diwajibkan menentukan target penurunan emisi gas rumah kaca secara kuantitatif. Namun, Indonesia secara sukarela telah memberikan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RAN GRK) melalui Perpres No. 61/2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah (RAD GRK) yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Langkah penurunan emisi diiringi dengan langkah adaptasi yang rencana aksinya sudah selesai disusun pada tahun 2013.

Rencana pelaksanaan rencana mitigasi dan rencana adaptasi perubahan iklim pada berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019 dengan target penurunan emisi GRK sekitar 26 persen pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah. RAD-GRK dari 33



provinsi sebagian besar sudah dimasukkan dalam perencanaan daerah, atau RPJMD. Sehubungan dengan itu, Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah perlu menjadikan target penurunan emisi dan adaptasi GRK sebagai indikator kinerja. Untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut, terus dilanjutkan pula peningkatan kapasitas SDM dan kapasitas lembaga pelaksana, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

BAB 4

KERANGKA EKONOMI MAKRO

Kerangka ekonomi makro dalam periode 2015-2019 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Indonesia, masalah yang masih harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Kerangka ekonomi makro meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter, fiskal dan neraca pembayaran, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini dibagi dalam tiga pokok bahasan, yaitu (i) kondisi ekonomi menjelang akhir tahun 2014 (ii) prospek dan sasaran pokok ekonomi tahun 2015-2019; serta (iii) kebutuhan investasi dan sumber pembiayaan.

4.1 KONDISI EKONOMI MENJELANG AKHIR TAHUN 2014

Berbagai kebijakan dan reformasi struktural ekonomi pasca krisis Asia tahun 1997/1998 telah meningkatkan kekuatan ekonomi nasional. Dalam lima tahun terakhir, ekonomi tumbuh rata-rata hampir 6 persen per tahun. Secara fundamental, perekonomian nasional kokoh menghadapi berbagai tekanan dari krisis global. Ekonomi tumbuh 4,6 persen ketika terjadi Krisis Keuangan Lehman Brothers pada tahun 2009, dan masih tumbuh sebesar 5,8 persen pada tahun 2013, meskipun pada tahun 2009 banyak negara mengalami kontraksi sebagai akibat terjadinya krisis keuangan dan resesi global.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh sektor tersier yang dalam lima tahun terakhir tumbuh rata-rata 7,4 persen, diikuti sektor sekunder yang tumbuh rata-rata 4,3 persen dengan rata-rata pertumbuhan sektor industri sebesar 4,9 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir ditopang oleh investasi dan ekspor yang masing-masing tumbuh dengan rata-rata 6,9 persen dan 5,3 persen per tahun.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam lima tahun terakhir telah mendorong perluasan kesempatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil diturunkan dari 7,4 persen pada tahun 2010 menjadi 5,9 persen pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang disertai pelaksanaan kebijakan afirmatif dalam lima tahun terakhir telah menurunkan tingkat

kemiskinan. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 32,5 juta orang pada tahun 2009 menjadi 27,7 juta orang pada bulan September tahun 2014. Tingkat kemiskinan turun dari 14,1 persen menjadi 10,96 persen pada periode yang sama.

Kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi ditopang oleh stabilitas yang terjaga. Inflasi dapat dikendalikan dalam batas yang aman. Nilai tukar meskipun cenderung terdepresiasi, pergerakannya masih dalam taraf yang wajar. Defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen.

Meskipun dalam satu dekade terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik, tekanan dari ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia tetap berat. Krisis ekonomi global dan lambatnya pemulihan yang terjadi telah memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hanya mencapai 5,8 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang besarnya 6,3 persen pada tahun 2012 dan 6,5 persen tahun 2011.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2013, ditopang oleh konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Walaupun terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013, konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu tumbuh sebesar 5,3 persen (sama dengan pertumbuhan 2012). Konsumsi masyarakat berhasil dijaga dengan upaya pemerintah melalui program BLSM untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menstabilkan harga sehingga inflasi kembali normal sampai dengan akhir 2013. Pertumbuhan konsumsi juga didorong oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 4,9 persen dibanding tahun 2012 yang besarnya 1,3 persen. Sejalan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor hanya tumbuh 1,2 persen pada tahun 2013 dibanding tahun 2012 (6,7 persen).

Dari sisi produksi, sektor pertanian tumbuh sebesar 3,5 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor perikanan. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,6 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor alat angkut, mesin, dan peralatannya. Sektor tersier tumbuh sebesar 7,4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh sebesar 10,2 persen.

Perkembangan ini telah berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. PDB per kapita dalam dolar Amerika Serikat (USD) tahun 2013 mencapai USD3.500 sedikit menurun dibanding tahun 2012 yang besarnya USD3.583 karena depresiasi rupiah. Dalam rupiah PDB per

kapita meningkat dari Rp33,5 juta pada tahun 2012 menjadi Rp36,5 juta pada tahun 2013.

Tekanan ekonomi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang mendekati 6,0 persen membutuhkan impor barang modal dan jasa yang cukup besar. Oleh karena hal ini terjadi bersamaan dengan melambatnya pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, maka telah terjadi ketidakseimbangan eksternal. Surplus neraca transaksi berjalan yang selama ini terjadi mulai berkurang dan pada akhirnya mengalami defisit. Neraca transaksi berjalan bergeser dari surplus sebesar 0,3 persen per PDB pada triwulan III tahun 2011 menjadi defisit 3,9 persen per PDB pada triwulan III tahun 2013.

Memburuknya neraca transaksi berjalan juga diiringi oleh meningkatnya ketidakpastian aliran modal internasional, terutama disebabkan oleh isu *tapering off* yang mulai marak sejak pertengahan tahun 2013 terkait dengan rencana akan berakhirnya kebijakan *quantitative easing* (QE) yang telah diberlakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pasca krisis global Lehman Brothers. Dengan adanya isu ini, neraca arus modal secara total turun menjadi USD22,0 miliar pada tahun 2013 dari USD24,9 miliar pada tahun 2012. Penurunan surplus transaksi modal finansial terutama didorong oleh menurunnya investasi langsung dan investasi lainnya. Pada tahun 2013, investasi langsung mencapai surplus sebesar USD12,2 miliar, menurun dibandingkan tahun 2012 yang mencapai USD13,7 miliar. Sementara investasi lainnya juga menurun pada tahun 2013 menjadi sebesar USD0,8 miliar dari USD1,9 miliar pada tahun sebelumnya. Begitu halnya dengan cadangan devisa yang menurun dari USD112,8 miliar tahun 2012 menjadi USD99,4 miliar pada tahun 2013.

Untuk mengendalikan ketidakseimbangan eksternal ini, pemerintah telah meluncurkan Paket 23 Agustus 2013. Bersamaan dengan itu, memasuki Triwulan IV tahun 2013, perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan yang dimotori oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta indikasi pemulihan kawasan Eropa, Tiongkok dan India. Dengan kondisi ini, pada Triwulan IV tahun 2013 neraca pembayaran membaik, dan bergeser menjadi surplus sebesar USD4,4 miliar, setelah tiga triwulan sebelumnya mengalami defisit. Surplus tersebut meningkat kembali menjadi USD6,5 miliar pada Triwulan III tahun 2014. Tren perbaikan neraca pembayaran ini ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang turun menjadi USD6,8 miliar, atau 3,1 persen per PDB pada Triwulan II tahun 2014, lebih rendah dari defisit Triwulan III tahun 2013, yang besarnya USD 8,6 miliar, atau 3,9 persen PDB.

Ditengah masih berlanjutnya ketidakpastian global, transaksi modal dan finansial Triwulan IV tahun 2013 surplus sebesar USD8,8 miliar, meningkat dibandingkan surplus sebesar USD4,5 miliar pada triwulan sebelumnya, dan terus meningkat hingga mencapai USD13,7miliar pada Triwulan III tahun 2014. Kenaikan surplus transaksi modal finansial terutama didorong oleh meningkatnya komponen investasi portofolio yang ditopang oleh bertambahnya pembelian investor asing pada instrumen portofolio berdenominasi rupiah (saham dan SUN) dan adanya penerbitan obligasi global pemerintah. Investasi portofolio asing juga mencatat surplus namun tidak jauh berbeda dari Triwulan IV tahun 2013. Terkait dengan membaiknya neraca transaksi berjalan dan aliran modal masuk tersebut, cadangan devisa terus meningkat dari USD95,7 miliar pada Triwulan III tahun 2013 menjadi USD99,4 miliar pada Triwulan IV tahun 2013, dan mencapai USD111,2 miliar Triwulan III tahun 2014.

Tekanan pada neraca pembayaran berdampak pada nilai tukar rupiah. Rupiah melemah sebesar 20,8 persen (y-o-y) selama tahun 2013 ke level Rp12.189 per USD. Sejalan dengan membaiknya neraca pembayaran serta upaya BI untuk terus menjaga stabilitas rupiah, tekanan terhadap rupiah mulai menurun dan sampai dengan 9 Juni 2014 menguat hingga mencapai Rp. 11.779 per USD.

Sejalan dengan itu, IHSG pada tahun 2013 bergerak dengan tren menurun. Setelah mencapai rekor IHSG tertinggi sebesar 5.215,0 yang terjadi pada bulan Mei 2013 (meningkat 20,8 persen dibanding posisi akhir 2012), pada bulan Juli-Agustus 2013 IHSG anjlok dan menyentuh 3.994,5 pada bulan Agustus 2013. Dengan mulai menguatnya perekonomian global dan mulai membaiknya neraca pembayaran pada Triwulan IV 2013, IHSG menguat 0,4 persen pada Desember 2013 dibanding posisi akhir November 2013, dan selanjutnya terus menguat hingga mencapai 4.885,1 pada awal bulan Juni tahun 2014. IHSG terpantau menguat hingga mencapai 5.137,58 di akhir triwulan III tahun 2014. Pada akhir triwulan IV tahun 2014, IHSG terpantau menguat hingga level 5.226,95.

Dari sisi moneter, melemahnya nilai tukar rupiah yang disertai dengan kenaikan harga BBM bersubsidi telah mendorong peningkatan inflasi menjadi 8,4 persen (y-o-y) pada tahun 2013 dibanding 4,3 persen (y-o-y) pada tahun 2012. Peningkatan yang tinggi baru terjadi ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan. Melalui berbagai kebijakan yang ditempuh tekanan inflasi berangsur-angsur dapat dikendalikan. Pergerakan nilai tukar rupiah saat ini terus mengalami pelemahan. Rupiah melemah menyentuh level tertingginya di pertengahan Desember 2014. Berdasarkan catatan, nilai kurs rupiah terhadap USD

mencapai level Rp.12.725/USD pada penutupan tanggal 16 Desember 2014. Pelemahan rupiah dibulan Desember 2014 merupakan pelemahan terbesar sepanjang tahun 2014. Pada akhir triwulan IV tahun 2014, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup pada level Rp 12.388. Pelemahan rupiah saat ini sedikit lebih buruk dibanding tahun 2008. Saat itu perekonomian tumbuh di atas 6 persen, sementara saat ini ekonomi tumbuh melambat pada kisaran 5,1 persen dan neraca perdagangan masih mengalami defisit.

Sejalan dengan itu, suku bunga BI terus meningkat dari 5,75 persen pada bulan Mei 2013 menjadi 7,75 persen pada Desember 2014. Kenaikan BI rate berpengaruh dan mengakibatkan peningkatan suku bunga perbankan termasuk suku bunga pinjaman. Dengan tren perlambatan ekonomi dan adanya kenaikan suku bunga kredit, laju pertumbuhan kredit mengalami penurunan. Pertumbuhan kredit hingga Desember 2013 hanya sebesar 20,2 persen (y-o-y) dibandingkan sebesar 23,3 persen (y-o-y) yang tercatat pada akhir tahun 2012. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan tajam kredit rupiah dari 24,0 persen (y-o-y) pada akhir 2012 menjadi 19,2 persen (y-o-y) pada akhir 2013. Selanjutnya sampai dengan bulan September tahun 2014 pertumbuhan kredit hanya 13,5 persen (y-o-y), menurun dibandingkan pada Desember 2013 yang mencapai 20,2 persen.

Suku bunga BI sebesar 7,50 persen masih dipertahankan hingga bulan November 2014. Namun demikian, BI selanjutnya memutuskan untuk meningkatkan BI rate sebesar 25 bps menjadi 7,75 persen untuk merespon kebijakan pengurangan subsidi BBM yang ditempuh Pemerintah. Adapun suku bunga *Lending Facility* naik sebesar 50 bps menjadi 8 persen dan suku bunga *Deposit Facility* tetap pada level 5,75 persen berlaku efektif sejak 19 November 2014. Kenaikan BI *rate* ditempuh untuk menjangkar ekspektasi inflasi dan memastikan bahwa tekanan inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi tetap terkendali, temporer, dan dapat segera kembali pada lintasan sasaran yaitu 4 ± 1 persen pada tahun 2015. BI menilai kebijakan tersebut konsisten dengan kemajuan dalam mengelola defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat. Selanjutnya Bank Indonesia terus memeperkuat bauran kebijakan untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga. Kebijakan moneter yang cenderung ketat tetap dilanjutkan untuk mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan, sementara kebijakan makroprudensial yang akomodatif ditempuh agar pengetatan moneter tersebut tidak menimbulkan resiko terhadap stabilitas sistem keuangan.

Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan kredit, ketahanan industri perbankan masih tetap terjaga, yang tercermin dari: (i) rasio

kecukupan modal, CAR (*Capital Adequacy Ratio*), masih tetap tinggi sampai dengan bulan Maret tahun 2014, yaitu sebesar 19,8 persen; dan (ii) rasio kredit bermasalah, NPL (*Non Performing Loan*) yang rendah, yaitu sebesar 1,9 persen pada bulan Maret tahun 2014. Dilihat dari perkembangannya, CAR terus meningkat dari 17,43 persen pada bulan Desember tahun 2012 menjadi 19,8 persen pada bulan Maret tahun 2014. Sementara itu, NPL tetap rendah dan stabil, yaitu sebesar 1,9 persen selama kurun waktu yang sama.

Dari sisi keuangan negara dan fiskal, selama kurun waktu 2010-2014, APBN menunjukkan kinerja yang baik. Pendapatan negara dan hibah meningkat rata-rata 13,2 persen per tahun atau naik dari Rp. 995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.438,9 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp. 1.635,4 triliun pada tahun 2014. Peningkatan pendapatan negara tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang meningkat rata-rata sebesar 14,6 persen per tahun dan menyumbang lebih dari 70 persen dari total penerimaan dalam negeri. Capaian tersebut didorong oleh langkah-langkah pembaruan kebijakan serta penyempurnaan sistem dan administrasi perpajakan seperti penerapan sistem informasi perpajakan (SIDJP) serta peningkatan perluasan basis pajak dalam rangka penggalan potensi perpajakan.

Realisasi belanja negara dalam kurun waktu yang sama naik rata-rata sebesar 15,6 persen per tahun atau meningkat dari Rp. 1.042,1 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 1.650,6 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp. 1.869,4 triliun pada tahun 2014. Peningkatan belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan belanja pemerintah pusat rata-rata sebesar 16,1 persen per tahun. Peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat tersebut utamanya didorong oleh peningkatan belanja barang dan belanja modal serta kenaikan belanja subsidi BBM dan listrik. Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah, alokasi belanja ke daerah juga mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu yang sama belanja ke daerah tumbuh rata-rata sebesar 14,7 persen per tahun yaitu meningkat dari Rp. 344,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 513,3 triliun pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai Rp. 596,5 triliun pada tahun 2014.

Dalam kurun waktu 2010-2014 defisit anggaran cenderung sedikit longgar yakni dari 0,7 persen PDB pada tahun 2010 dan diperkirakan menjadi 2,0 persen PDB pada tahun 2014. Rasio utang pemerintah terhadap PDB berhasil diturunkan menjadi 26,2 persen pada tahun 2010, dan diperkirakan menjadi 23,9 persen pada tahun 2014.

Meskipun secara umum selama periode tahun 2010-2014 kinerja perekonomian cukup baik, dalam lima tahun kedepan masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut bersumber baik dari sisi eksternal maupun internal.

Secara spesifik, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bidang keuangan negara dapat dibagi berdasarkan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah yang terkait dengan pendapatan negara. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari sisi penerimaan perpajakan, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah *tax coverage ratio*-nya masih rendah sehingga realisasi penerimaan masih di bawah potensi penerimaannya. Kondisi ini disebabkan oleh: (i) masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM yang memenuhi harapan organisasi dan masyarakat; (ii) masih terkendalanya perluasan basis pajak dalam kondisi ekonomi dunia yang masih belum sepenuhnya stabil; (iii) masih belum tergalinya sumber-sumber penerimaan pajak, baik dari sektor unggulan maupun sektor informal yang sampai saat ini masih belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara; serta (iv) meningkatnya penandatanganan perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara lain yang berpotensi untuk memberikan dampak negatif bagi penerimaan negara.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), permasalahan dihadapi adalah: (i) kecenderungan penurunan *lifting* minyak mentah Indonesia karena penurunan produksi secara alamiah dan rendahnya investasi baru di sektor migas; (ii) masih banyaknya sumber-sumber PNBP SDA non-migas yang belum tergal; (iii) masih belum optimalnya peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, terutama yang terkait dengan mekanisme pengelolaan PNBP; (iv) belum optimalnya penerimaan iuran tetap dan royalti yang bersumber dari pertambangan mineral dan batubara; dan (v) masih tingginya risiko tidak tercapainya penerimaan atas laba BUMN, terutama karena faktor kinerja BUMN dan kondisi ekonomi makro.

Yang kedua adalah yang terkait dengan belanja negara. Permasalahan utama yang dihadapi adalah: (i) masih terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh belanja-belanja yang bersifat wajib; (ii) masih rendahnya efisiensi dan efektivitas belanja negara; (iii) masih belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan belanja negara yang tercermin dari masih lebih rendahnya realisasi terhadap target, terutama untuk belanja modal sementara belanja subsidi justru lebih tinggi dari target; (iv) belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja negara; dan (v) masih rendahnya efektivitas dan

efisiensi belanja ke daerah sebagai dampak dari: (a) pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal ditunjukkan dengan alokasi belanja pegawai cukup tinggi, alokasi belanja modal relatif rendah, penetapan APBD sering terlambat, penyerapan APBD relatif terlambat, hasil audit BPK atas LKPD masih sedikit yang mendapat opini WTP, belum semua APBD dapat diakses publik; dan (b) belum optimalnya sinergi antara kebijakan dan program nasional dengan kebijakan dan program di daerah menjadikan pengeluaran APBD dan pengeluaran APBN untuk daerah tidak efektif.

Yang ketiga adalah yang terkait dengan pembiayaan APBN. Permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan dalam negeri, adalah: (i) belum optimalnya pasar keuangan domestik dan infrastruktur SBN; (ii) tingginya kepemilikan SBN oleh asing sehingga rentan terhadap risiko terjadinya penarikan dana secara besar-besaran jika terjadi krisis kepercayaan yang dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian secara nasional; dan (iii) masih lemahnya koordinasi pengelolaan SBN. Sementara itu, permasalahan utama yang dihadapi dalam pembiayaan luar negeri adalah: (i) belum optimalnya strategi utang sehingga diperoleh biaya pendanaan (*cost of fund*) dan tingkat risiko yang optimal; (ii) belum optimalnya persiapan dan penilaian utang luar negeri sehingga berpotensi meningkatkan beban biaya (*commitment fee*) akibat dari keterlambatan pemenuhan persyaratan pemberi pinjaman (*lender*), khususnya pada utang baru serta lemahnya daya ungkit dalam mendorong ekonomi.

Tantangan lain yang tak kalah pentingnya adalah reformasi kelembagaan keuangan negara agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan negara yang seimbang dan efektif. Fungsi-fungsi tersebut adalah: (i) penguatan perencanaan dan penganggaran; (ii) pengumpulan pendapatan terpadu (*revenue collection*); (iii) penguatan kapasitas kebijakan fiskal; serta (iv) penguatan kapasitas perbendaharaan (*treasury*).

TABEL 4.1
GAMBARAN EKONOMI MAKRO

INDIKATOR	Realisasi				Perkiraan
	2010	2011	2012	2013	2014
Perkiraan Besaran-besaran Pokok					
Pertumbuhan PDB (%)	6,2	6,5	6,3	5,8	5,1
PDB per Kapita (ribu Rp)	27.029	30.659	33.531	36.508	43.403
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	5,1	5,4	4,3	8,4	8,4
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	8.991	9.068	9.670	12.189	11.900
Neraca Pembayaran					
Transaksi Berjalan/PDB (%)	0,7	0,2	-2,8	-3,8	-3,0
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	30,7	25,7	-6,0	-2,1	-1,0
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	38,9	24,8	9,3	-3,6	-1,0
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	96,2	110,1	112,8	99,4	112,4
Keuangan Negara					
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)	0,6	0,1	-0,6	-1,1	-0,7
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-0,7	-1,1	-1,9	-2,3	-2,0
Penerimaan Pajak/PDB (%)	11,3	11,8	11,9	11,9	11,5
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	26,2	24,4	24,0	26,1	23,9
Utang Luar Negeri	9,6	8,4	7,5	7,8	6,2
Utang Dalam Negeri	16,6	16,0	16,5	18,3	17,7
Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan					
Tingkat Pengangguran	7,4	6,8	6,2	5,8	5,9
Tingkat Kemiskinan	13,33	12,49	11,46	11,37	10,96*)

*) Tingkat Kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada bulan November 2014

4.2 PROSPEK EKONOMI TAHUN 2015-2019

Dalam periode tahun 2015-2019, untuk mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk itu, perlu diupayakan langkah-langkah yang sungguh-sungguh dalam mendorong investasi, ekspor, konsumsi, maupun pengeluaran pemerintah.

Untuk mewujudkan perekonomian yang lebih mandiri, industri-industri (berdasarkan PDB dengan tahun dasar 2010, sebutan sektor diubah menjadi industri) strategis ekonomi domestik akan lebih digiatkan dengan prioritas pada kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi serta upaya untuk mendorong industri pengolahan dan pariwisata. Langkah-langkah tersebut akan didukung dengan upaya perwujudan kedaulatan keuangan yang ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang

tinggi juga akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Transformasi ekonomi melalui industrialisasi yang berkelanjutan ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Kesemuanya ini digambarkan dalam prospek ekonomi 2015-2019 yang diperkirakan akan dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan; (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi pada periode tahun 2015-2019; serta (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

4.2.1 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran

Dengan berbagai kebijakan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat tajam sejak tahun 2016, menjadi 7,1 persen pada tahun 2017, dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 7,5 persen dan 8,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ini, pendapatan perkapita naik dari Rp. 47,8 Juta (USD3.918,3) pada tahun 2015 hingga mencapai Rp. 72,2 Juta (USD 6.018,1) pada tahun 2019.

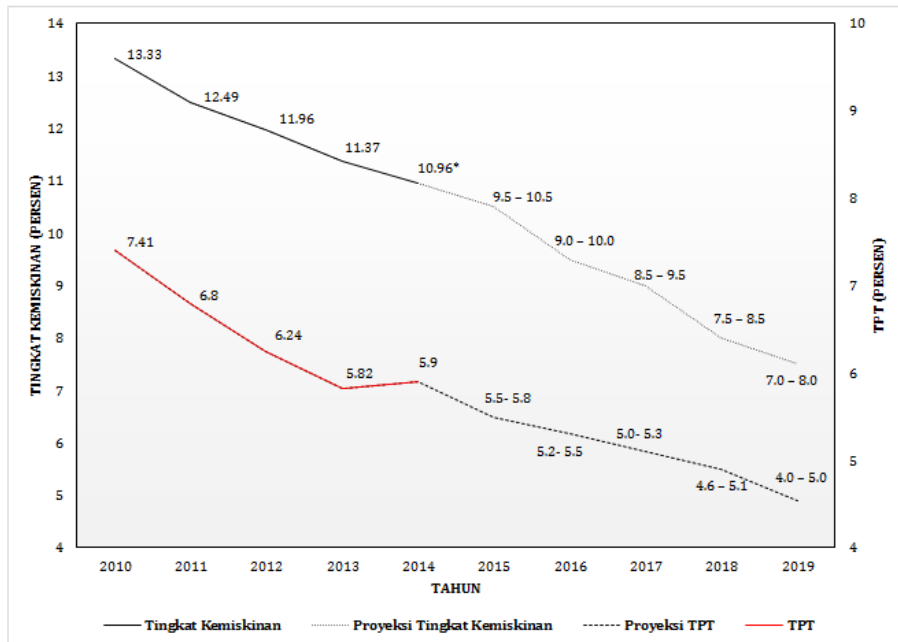
Dari sisi pengeluaran, investasi didorong dan mencapai sekitar 10,4 persen pada tahun 2017, dan 12,1 persen pada tahun 2019. Dorongan kuat dari investasi akan meningkatkan kontribusi ekspor barang dan jasa, serta konsumsi. Ekspor diperkirakan tumbuh 8,8 persen pada tahun 2017, dan mencapai 12,2 persen pada tahun 2019. Konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah tumbuh secara bertahap dan masing-masing mencapai 6,1 persen dan 2,5 persen pada tahun 2019.

Dari sisi produksi, industri pengolahan dalam lima tahun diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu industri pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 4,5 persen. Seiring dengan pertumbuhan PDB secara keseluruhan, industri tersier juga mengalami kenaikan dengan pertumbuhan tertinggi pada industri informasi dan komunikasi yang mencapai 13,4 persen pada tahun 2019, ditopang oleh membaiknya infrastruktur dan meningkatnya pemakaian alat telekomunikasi.

Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat kemiskinan diupayakan terus menurun dan mencapai sekitar 7,0-8,0 persen pada akhir tahun 2019, dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,0-5,0 persen pada akhir tahun 2019. Untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan ditempuh langkah-langkah konkret untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang

berkualitas, diantaranya: (i) meningkatkan produktivitas dengan melakukan akselerasi penyerapan tenaga kerja ke industri yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi termasuk industri pertanian yang merupakan pemberi kesempatan kerja besar serta industri pengolahan yang mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup; (ii) meningkatkan standar hidup pekerja termasuk pekerja miskin, melalui penyediaan lapangan kerja produktif; (iii) transformasi struktur tenaga kerja dengan mempersiapkan infrastruktur pengembangan kompetensi pekerja untuk mengubah *low-skilled industries* menjadi *skills-based industries*; dan (iv) memberikan insentif bagi investasi yang menciptakan kesempatan kerja besar (padat pekerja) dan bagi pelaku usaha kecil-menengah. Keseimbangan dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja yang memadai akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja yang baik dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan.

GAMBAR 4.2
PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN DAN TPT 2015-2019



Sumber: BPS dan Proyeksi Bappenas

*)Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum kebijakan pengurangan subsidi BBM Bulan November 2014.

4.2.2 Moneter

Kebijakan pada bidang moneter dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk tetap fokus pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan yang tetap kondusif bagi pengembangan sektor riil. Kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamen-talnya. Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akan diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Kebijakan makroprudensial akan diarah-kan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengenda-lian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan terus berkoordinasi untuk meningkatkan akses masyarakat pada per-bankan (*financial inclusion*) serta mendorong pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*) dengan tetap menjaga kehati-hatian makro (*macro prudentiality*) dan kesehatan perusahaan jasa keuang-an pada tataran mikro. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi transaksi perekonomian dan meningkatkan kredibilitas Rupiah, dengan semakin stabilnya kondisi perekonomian kedepan, direncana-kan akan diterapkan kebijakan Redenominasi atau perubahan harga mata uang melalui penyederhanaan jumlah digit pada denominasi uang rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga, ataupun nilai tukar-nya. Peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan diperjelas batasannya melalui revisi undang-undang terkait sehingga pelaksanaan kebijakan moneter akan lebih efektif dan efisien.

Beberapa hal penting terkait strategi kebijakan moneter ke depan, diantaranya adalah: (i) meningkatkan koordinasi para pemangku kebijakan (BI dan K/L terkait) baik di tingkat pusat (seperti Tim Pengendali Inflasi - TPI dan Tim Asumsi Makro) maupun daerah (TPID) untuk meningkatkan efektivitas kebijakan; (ii) penguatan kebijakan struktural untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk implementasi peta-jalan (*roadmap*) pengurangan subsidi BBM secara bertahap bersama dengan konversi konsumsi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan, kebijakan di sektor keuangan, terutama pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil; (iii) peningkatan kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi; (iv) penguatan respon kebijakan yang kuat (*bold*) untuk mendukung sistem keuangan dan

neraca korporasi yang sehat; (v) peningkatan komunikasi yang intensif untuk menjangkar persepsi pasar.

Dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, dalam periode 2015-2019 laju inflasi akan dapat dikendalikan rata-rata sekitar 3,5-5,0 persen. Nilai tukar diupayakan dalam volatilitas yang terjaga menuju Rp12.000/USD hingga tahun 2019. Prospek perekonomian dalam jangka menengah diperkirakan akan berada dalam tren membaik seiring dengan implementasi kebijakan-kebijakan reformasi struktural di berbagai bidang yang didukung oleh peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

4.2.3 Neraca Pembayaran

Berbagai langkah reformasi secara komprehensif yang dilakukan akan meningkatkan kinerja neraca pembayaran. Perbaikan lingkungan global dan membaiknya harga komoditas dunia akan turut mendorong membaiknya kinerja neraca pembayaran.

Defisit transaksi berjalan diperkirakan menurun dalam periode tahun 2015-2019. Transaksi berjalan tahun 2015 yang diperkirakan mengalami defisit sebesar USD29,1 miliar berangsur-angsur turun menjadi sebesar USD7,7 miliar pada tahun 2019. Perbaikan neraca transaksi berjalan terutama diperkirakan bersumber dari perbaikan neraca perdagangan barang, terutama peningkatan surplus perdagangan non migas.

Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan meningkat cukup besar dan mencatat surplus sebesar USD48,7 miliar pada akhir tahun 2019, lebih besar dibandingkan surplus transaksi modal dan finansial pada tahun 2015 yang diperkirakan sebesar USD36,6 miliar. Perbaikan neraca transaksi modal dan finansial tersebut diperkirakan terutama berasal dari penanaman modal asing (FDI) ke Indonesia. Iklim investasi yang semakin membaik dengan beberapa kebijakan yang ditujukan untuk menarik perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia diperkirakan akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi di Asia. Diperkirakan nilai investasi luar negeri tahun 2019 mencapai USD29,5 miliar, atau meningkat sebesar 48,4 persen dari tahun 2015 yang besarnya USD19,9 miliar.

Perbaikan neraca transaksi modal dan finansial juga bersumber dari investasi portofolio. Diperkirakan investasi portofolio meningkat kurang lebih USD0,5 miliar dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, secara keseluruhan Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan mencatat surplus sebesar USD7,5 miliar pada tahun 2015, dan USD41,0 pada tahun 2019. Sejalan dengan itu posisi

cadangan devisa diperkirakan terus meningkat dari USD119,9 miliar pada tahun 2015, menjadi USD156,3 miliar pada tahun 2019.

4.2.4 Keuangan Negara dan Fiskal

Kebijakan fiskal pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja negara, dan optimalisasi pengelolaan risiko pembiayaan/utang.

Dengan arah kebijakan fiskal tersebut, pendapatan negara diperkirakan akan meningkat rata-rata 17,2 persen PDB dalam periode 2015-2019. Peningkatan pendapatan negara tersebut didorong utamanya melalui penerimaan perpajakan yang diperkirakan mencapai sebesar 16 persen PDB (termasuk pajak daerah sebesar satu persen PDB).

Dari sisi belanja, belanja pemerintah pusat akan meningkat rata-rata 15,3 persen per tahun sepanjang 2015-2019. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas belanja negara, komposisi belanja pemerintah pusat akan mengalami perubahan. Salah satunya dapat dilihat dari menurunnya belanja subsidi energi dari 1,3 persen PDB pada tahun 2015 menjadi 0,6 persen PDB pada tahun 2019. Selain itu, penghematan dilakukan pada pos perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat, yang akan dijaga pada tingkat yang wajar. Belanja modal diproyeksikan mengalami peningkatan dari 2,4 persen PDB pada tahun 2015 menjadi 3,9 persen PDB pada tahun 2019. Peningkatan belanja modal tersebut terutama untuk membiayai berbagai program infrastruktur pemerintah.

Belanja ke daerah diperkirakan akan meningkat rata-rata 17,3 persen per tahun. Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh pemenuhan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan dialokasikannya Dana Desa. Dana Desa diproyeksikan akan meningkat secara bertahap sepanjang 2015-2019.

Melalui upaya peningkatan pendapatan dan kualitas belanja negara, kinerja keseimbangan primer dan defisit anggaran diperkirakan akan mengalami peningkatan. Keseimbangan primer akan membaik dan menjadi positif pada tahun 2019, sementara defisit anggaran akan dijaga dalam batas aman sebagaimana diamanatkan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sepanjang tahun 2015-2019, defisit anggaran akan menurun dan mencapai 1,0 persen PDB

pada tahun 2019. Dengan keseimbangan primer dan defisit anggaran yang membaik, rasio stok utang akan menurun menjadi 20,0 persen PDB pada tahun 2019.

Dengan berbagai kebijakan yang akan diambil dalam lima tahun ke depan tersebut, prospek keuangan negara dalam jangka menengah periode ketiga adalah sebagaimana dalam Tabel 4.5. Prospek keuangan negara tersebut sejalan dengan arahan RPJPN 2005-2025 yang menuntut pengelolaan keuangan negara untuk bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan.

4.3 KEBUTUHAN INVESTASI DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan yang telah ditetapkan kebutuhan investasi selama lima tahun sebesar Rp. 26.557,9 triliun (harga berlaku) atau meningkat dengan rata-rata 14,8 persen per tahun. Peranan investasi masyarakat meningkat dari 29,2 persen PNB pada tahun 2015 menjadi 31,0 persen PNB pada tahun 2019, sedangkan peranan investasi pemerintah pusat dan daerah diproyeksikan meningkat sebesar rata-rata 5,4 persen pada periode yang sama. Dengan demikian, jumlah investasi pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2015-2019 diperkirakan akan mencapai Rp. 4.023,8 triliun.

Pembiayaan kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik yang bersumber dari tabungan pemerintah maupun dari tabungan masyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan negara serta relatif terkendalinya pengeluaran rutin, tabungan pemerintah diperkirakan bergeser dari sebesar -0,2 persen PNB pada tahun 2015 menjadi sebesar 3,1 persen PNB pada tahun 2019. Adapun tabungan masyarakat diperkirakan meningkat dari 30,5 persen PNB pada tahun 2015 menjadi 33,0 persen pada tahun 2019. Sementara itu, tabungan luar negeri yang diperkirakan surplus sebesar 3,0 persen PNB tahun 2015 secara berangsur bergeser menjadi hanya sebesar 1,1 persen tahun 2019.

Dari sisi pembiayaan, institusi keuangan untuk membiayai investasi masyarakat dikategorikan sebagai berikut: (i) peran perbankan akan meningkat dari 6,4 persen PNB pada tahun 2015 menjadi 8,8 persen PNB pada tahun 2019, sejalan dengan upaya BI untuk meningkatkan likuiditas ke masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; (ii) peran luar negeri selama lima tahun meningkat menjadi 5,6 persen PNB tahun 2019, sejalan dengan masuknya aliran modal; (iii) peran saham akan naik dari 0,6 persen

PNB pada tahun 2015 menjadi 1,2 persen PNB pada tahun 2019, peran obligasi akan naik dari 3,7 persen PNB pada tahun 2015 hingga mencapai 5,0 persen PNB pada tahun 2019; dan (iv) peran dana internal perusahaan (*returned earning*) dalam berinvestasi akan semakin berkurang, yaitu dari 13,2 persen PNB pada tahun 2015 hingga menjadi 10,5 persen PNB pada tahun 2019 karena peran lembaga keuangan yang semakin baik.

TABEL 4.2
SASARAN EKONOMI NASIONAL

	Perkiraan 2014	Proyeksi Jangka Menengah				
		2015	2016	2017	2018	2019
Perkiraan Besaran-besaran Pokok						
Pertumbuhan PDB (%)*)	5,1	5,8	6,6	7,1	7,5	8,0
PDB per Kapita (ribu Rp) *)	43.403	47.804	52.686	58.489	64.721	72.217
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	8,4	5,0	4,0	4,0	3,5	3,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	11.900	12.200	12.150	12.100	12.050	12.000
Neraca Pembayaran						
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	-1,0	8,0	9,9	11,9	13,7	14,3
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	-1,0	6,1	7,1	10,2	11,7	12,3
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	112,4	119,9	129,7	136,8	145,2	156,3
Keuangan Negara **)						
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	0,0
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-2,0	-1,9	-1,8	-1,6	-1,4	-1,0
Penerimaan Pajak/PDB (%)	11,5	13,2	14,2	14,6	15,2	16,0
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	23,9	26,7	23,3	22,3	21,1	19,3
Utang Luar Negeri	6,2	5,3	4,8	4,2	3,8	3,3
Utang Dalam Negeri	17,7	18,7	18,6	18,2	17,7	16,7
Pengangguran dan Kemiskinan (%)						
Tingkat Pengangguran	5,9	5,5-5,8	5,2-5,5	5,0-5,3	4,6-5,1	4,0-5,0
Tingkat Kemiskinan	10,96***)	9,5-10,5	9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	7,0-8,0

Keterangan:

*) Berdasarkan PDB tahun dasar 2010

**) Tahun 2015 menggunakan Angka RAPBN-P 2015, penerimaan pajak tahun 2016-2019 termasuk pajak daerah sebesar 1 persen PDB

***) Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014.

TABEL 4.3
SASARAN PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR EKONOMI*)

INDIKATOR	Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah					Rata-Rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Pertumbuhan PDB (%)	5,1	5,8	6,6	7,1	7,5	8,0	7,0
Sisi Pengeluaran							
Konsumsi Rumah Tangga	5,2	5,3	5,5	5,7	5,8	6,1	5,7
Konsumsi LPNRT	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	7,2
Konsumsi Pemerintah	2,4	1,3	1,6	2,0	2,3	2,5	1,9
Investasi (PMTB)	4,9	8,1	9,3	10,4	11,2	12,1	10,2
Ekspor Barang dan Jasa	-0,7	2,1	7,6	8,8	11,0	12,2	8,3
Impor Barang dan Jasa	-3,6	1,5	6,8	9,8	12,5	14,0	8,9
Sisi Produksi							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9	4,5
Pertambangan dan Penggalian	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,0
Industri Pengolahan	4,7	6,1	6,9	7,4	8,1	8,6	7,4
Pengadaan Listrik dan Gas, dan air bersih	5,0	5,6	6,3	7,2	7,9	8,7	7,1
Pengadaan Air	4,2	5,3	6,2	6,7	7,2	7,7	6,6
Konstruksi	6,0	6,4	6,8	7,3	7,5	7,8	7,2
Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,5	4,9	7,3	7,9	8,0	8,4	7,3
Transportasi dan Pergudangan	6,9	8,1	8,7	9,3	9,7	10,3	9,2
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	5,1	5,7	6,3	7,2	7,8	8,6	7,1
Informasi dan Komunikasi	9,1	9,7	10,6	11,6	12,3	13,4	11,5
Jasa Keuangan	8,2	8,8	9,2	9,6	10,0	10,4	9,6
Real Estate	6,3	6,8	7,4	7,9	8,5	9,0	7,9
Jasa Perusahaan	8,7	9,1	9,2	9,4	9,5	9,6	9,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,6	1,4	2,6	3,7	4,8	6,0	3,7
Jasa Pendidikan	7,3	8,8	9,4	10,1	10,7	11,4	10,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,6	6,9	8,1	9,0	10,0	11,0	9,0
Jasa lainnya	6,1	6,7	7,0	7,3	7,7	7,9	7,3
Distribusi PDB (%)							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,3	13,2	13,0	12,8	12,6	12,3	12,8
Industri Pengolahan	20,7	20,8	21,0	21,1	21,3	21,6	21,2
Lainnya	66,0	66,0	66,0	66,1	66,1	66,1	66,1

Keterangan:

*) Berdasarkan PDB tahun dasar 2010

TABEL 4.4
PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN (US\$ MILIAR)

Indikator	Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ekspor						
Migas	32,9	32,3	32,6	33,1	33,9	35,2
Nonmigas	145,2	156,7	172,2	192,8	219,2	250,5
<i>(Pertumbuhan, %)</i>	-1,0	8,0	9,9	11,9	13,7	14,3
Impor						
Migas	-46,1	-48,9	-51,7	-54,4	-57,1	-59,9
Nonmigas	-131,6	-	-	-	-	-
<i>(Pertumbuhan, %)</i>	-1,0	139,6	149,5	164,8	184,1	206,7
	-1,0	6,1	7,1	10,2	11,7	12,3
Jasa-jasa	-2,8	-2,9	-3,0	-3,1	-3,2	-3,3
Pembayaran Bunga Pinjaman Pemerintah						
	-28,2	-29,1	-27,4	-22,4	-15,8	-7,7
Transaksi Berjalan						
Neraca Arus Modal						
Pemerintah	-2,4	-2,0	-3,1	-3,2	-3,1	-2,3
Arus Masuk	12,5	12,5	12,6	12,6	13,2	13,9
Arus Keluar						
Swasta	17,3	19,9	22,2	25,2	27,7	29,5
PMA Neto	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8
Portofolio	3,2	3,9	3,1	3,3	3,7	4,8
Lainnya						
Surplus/Defisit	4,5	7,5	9,8	18,1	28,4	41,0
<i>(Overall Balance)</i>	112,4	119,9	129,7	136,8	145,2	156,3
Cadangan Devisa	6,4	6,4	6,8	6,6	6,3	6,1
<i>(Dalam Bulan Impor)</i>	32,9	32,3	32,6	33,1	33,9	35,2

TABEL 4.5
SASARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
(% PDB)

INDIKATOR	Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah				
	2014	2015*)	2016	2017	2018	2019
A. Penerimaan Negara dan Hibah**)	15,1	15,6	16,7	17,1	17,7	18,5
I. Penerimaan Dalam Negeri**)	15,1	15,5	16,6	17,0	17,7	18,5
1. Penerimaan Perpajakan**)	11,5	13,2	14,2	14,6	15,2	16,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,6	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5
II. Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Belanja Negara	17,1	16,4	17,4	17,7	18,1	18,5
I. Belanja Pemerintah Pusat	11,6	11,0	11,3	11,6	11,7	11,9
II. Belanja Daerah	5,5	5,5	6,1	6,1	6,4	6,6
C. Keseimbangan Primer	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	0,0
D. Surplus/Defisit	-2,0	-1,9	-1,8	-1,6	-1,4	-1,0
E. Pembiayaan	2,0	1,9	1,8	1,6	1,4	1,0
I. Dalam Negeri	2,1	2,1	1,8	1,6	1,4	1,0
II. Luar Negeri	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Keterangan:

**) Menggunakan angka RAPBN-P 2015*

****) Untuk tahun 2016-2019 termasuk pajak daerah*

TABEL 4.6
KEBUTUHAN INVESTASI (TRILIUN RUPIAH)

INDIKATOR	Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah					Jumlah
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(2015-19)
Kebutuhan Investasi	3.477	3.945	4.500	5.188	5.978	6.947	26.557.9
a. Pemerintah	333	493	673	763	937	1.158	4.023.8
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	3.1	4.2	5.1	5.2	5.7	6.2	5.4
b. Masyarakat	3.144	3.452	3.827	4.425	5.042	5.789	22.534
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	29.5	29.2	29.1	29.9	30.5	31.0	30.0
Sumber Pembiayaan	3.477	3.945	4.500	5.188	5.978	6.947	26.558
1.Tabungan Dalam Negeri	3.152	3.588	4.114	4.833	5.685	6.734	24.954
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	29.6	30.3	31.2	32.7	34.3	36.0	33.3
a. Pemerintah	-314	-22	105	213	356	575	1.227
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	-2.9	-0.2	0.8	1.4	2.2	3.1	1.6
b. Masyarakat	3.466	3.610	4.010	4.620	5.329	6.159	23.727
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	32.5	30.5	30.4	31.2	32.2	33.0	31.6
2.Tabungan Luar Negeri	325	357	386	355	293	213	1.604
<i>Persentase terhadap PNB (%)</i>	3.1	3.0	2.9	2.4	1.8	1.1	2.1
Tabungan - Investasi (S-I)							
Rasio Terhadap PNB (%)	-3.1	-3.0	-2.9	-2.4	-1.8	-1.1	

Keterangan:

PNB = Produk Nasional Bruto

TABEL 4.7
SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI MASYARAKAT
(RP TRILIUN)

	Perkiraan 2014	Jumlah (2010-14)	Proyeksi Jangka Menengah					Jumlah (2015-19)
			2015	2016	2017	2018	2019	
Sumber Pembiayaan Investasi Masyarakat (triliun Rp)	3.143,7	12.430,7	3.451,6	3.827,1	4.424,8	5.041,6	5.789,0	22.534,1
a. Kredit Perbankan	646,4	2.480,0	752,4	894,4	1.077,8	1.323,4	1.646,1	5.694,1
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	6,1	5,8	6,4	6,8	7,3	8,0	8,8	7,6
b. Luar Negeri	570,2	2.111,1	616,9	702,9	799,2	910,6	1.039,8	4.069,4
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	5,4	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,4
c. Penerbitan Saham	41,0	270,5	74,0	103,0	152,0	181,0	224,0	734,0
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	0,4	0,6	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,0
d. Penerbitan Obligasi	350,0	1.203,5	443,0	606,0	705,0	803,0	925,0	3.482,0
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	3,3	2,8	3,8	4,6	4,8	4,9	5,0	4,6
e. Dana Internal Masyarakat	1.536,1	6.365,6	1.565,3	1.520,8	1.690,9	1.823,6	1.954,1	8.554,6
<i>persentase terhadap PNB (%)</i>	14,4	14,9	13,2	11,5	11,4	11,0	10,5	11,4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 5

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

5.1 Visi Misi Pembangunan

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

**TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

5.2 Strategi Pembangunan Nasional

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam Gambar 5.1 yang menggariskan hal-hal sebagai berikut:

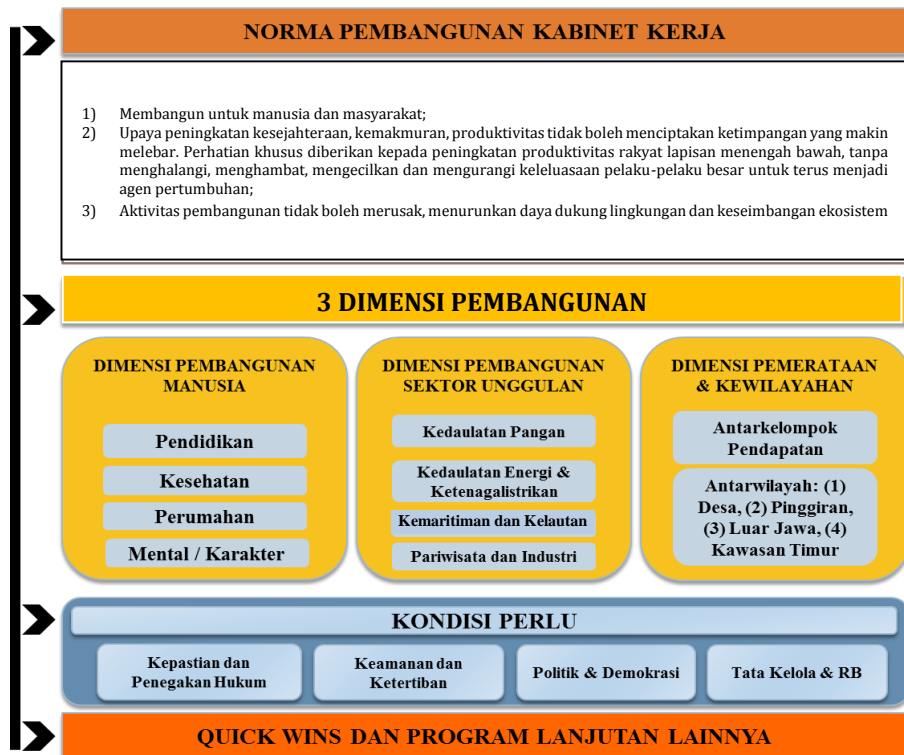
1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
 - b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
2. Tiga Dimensi Pembangunan;
 - a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

- b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:
- Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.
 - Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri.
 - Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
 - Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.
- c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.
- Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:
- Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;
 - Wilayah pinggiran;
 - Luar Jawa;
 - Kawasan Timur.
3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlukan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:
- a. Kepastian dan penegakan hukum;
 - b. Keamanan dan ketertiban;
 - c. Politik dan demokrasi; dan
 - d. Tetakelola dan reformasi birokrasi.
4. *Quickwins* (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output

cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

GAMBAR 5.1
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL



5.3 Sembilan Agenda Prioritas

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

5.4 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

1. Sasaran Makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
4. Sasaran Dimensi Pemerataan;
5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.